

PERBANASNews

No. 159 Tahun 2026 | April - Juni 2026

Revitalisasi Bisnis Model UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi Nasional

PERBANAS UTAMA

6 **Mencangkok UMKM ke Rantai Pasok Industri Studi Kasus Astra dan PisAgro**

Indonesia sering berbicara tentang UMKM dengan nada yang hampir religius. Mereka disebut tulang punggung ekonomi nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, dan penjaga stabilitas sosial ketika badai ekonomi datang. Semua itu benar. .

10 **Menakar Visi Pusat Finansial Internasional: Prospek dan Tantangan bagi Indonesia**

Pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kembali menorehkan sejarah baru bagi arsitektur ekonomi Indonesia.

14 **UMKM CENTER PERBANAS: Membangun Ekosistem agar UMKM Naik Kelas**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 60 persen dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Namun, di balik besarnya peran tersebut, masih terdapat tantangan mendasar yang menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

ARTIKEL PERBANAS

Menjadikan UMKM Indonesia “Bankable”, Terintegrasi dengan Industri dan Berdaya Saing Global 18

Menyeimbangkan Kemudi Moneter: BI Rate dan Daya Tahan Perbankan 21

Kartini Perbankan 2026 23

KEGIATAN

Saatnya Berkurban. Saatnya Peduli. 26

Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi Lindungi Data dengan Bijak dan Aman 27

PERBANAS bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Penanaman 1.153 bibit pohon 28

SUPLEMEN

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK BNP PARIBAS 13

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) 29

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) TAHUN 2024 - KONVENSIONAL 30

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) TAHUN 2024 - UNIT USAHA SYARIAH 33



PERBANASNews

No. 159 Tahun 2026
April - Juni 2026

PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(PERBANAS)

PELINDUNG

Badan Pengurus PERBANAS

REDAKSI

Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari
pihak luar. Panjang tulisan
3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang
dalam/luar berwarna

- 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

- 1 halaman: Rp4.500.000,00
- ½ halaman: Rp2.250.000,00

PERBANASNews menerima
pemasangan iklan dalam bentuk
laporan keuangan, display produk,
dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya PERBANAS Lantai 1
Jalan PERBANAS, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5223037, 5223038
website: www.PERBANAS.org
e-mail: sekretariat@PERBANAS.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS

MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993

Industri perbankan nasional saat ini berada dalam persimpangan yang menarik. Di satu sisi, sektor perbankan dituntut untuk tetap menjaga stabilitas dan kehati-hatian di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang. Di sisi lain, perbankan juga diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses keuangan, penguatan sektor produktif, serta dukungan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional.

Edisi PERBANASNews kali ini mengangkat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian industri perbankan, regulator, dan pelaku usaha. Salah satu topik utama yang mendapat perhatian khusus adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Keterbatasan akses pasar, kapasitas usaha, kemampuan manajerial, hingga integrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, penguatan UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan semata. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan yang berkelanjutan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas usaha, memperluas jaringan bisnis, dan menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih luas.

Atas dasar pemikiran tersebut, PERBANAS mengangkat tema pengembangan UMKM dalam dialog yang diselenggarakan dalam rangkaian Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS pada 18 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkaya perspektif mengenai strategi penguatan UMKM yang lebih komprehensif. Momentum ini sekaligus menandai peluncuran PERBANAS UMKM Center, sebuah inisiatif yang diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, pembelajaran, dan pengembangan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.

Topik lain yang menjadi sorotan adalah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia melalui kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin dalam kurun waktu satu bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah berbagai tekanan yang memengaruhi perekonomian global maupun domestik. Stabilitas makroekonomi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan tersebut perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Bagi industri perbankan, kenaikan suku bunga acuan tentu menghadirkan konsekuensi yang perlu dicermati. Salah satunya adalah meningkatnya biaya dana yang berpotensi memengaruhi strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Dalam situasi seperti ini, prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting agar



perbankan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kualitas aset, dan manajemen risiko. PERBANASNews mengulas berbagai pandangan mengenai implikasi kebijakan tersebut serta langkah-langkah yang dapat ditempuh industri perbankan dalam menghadapi perubahan lanskap suku bunga.

Selain itu, edisi ini juga membahas perkembangan penting dalam kerangka regulasi sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat daya saing sektor jasa keuangan Indonesia sekaligus mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah rencana pembentukan Indonesia Financial Center yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat aktivitas keuangan regional dan internasional. Di samping itu, konsep universal banking yang turut diakomodasi dalam kerangka regulasi baru membuka peluang bagi perbankan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Perubahan ini tentu menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang memerlukan kesiapan industri, baik dari sisi tata kelola, kapasitas kelembagaan, maupun penguatan manajemen risiko.

Melalui berbagai ulasan dalam edisi ini, PERBANASNews berupaya menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai isu-isu strategis yang tengah membentuk arah perkembangan industri perbankan nasional. Harapannya, berbagai pembahasan yang kami sajikan dapat menjadi sumber informasi, referensi, sekaligus inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong terciptanya sektor perbankan yang semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing. (*)

Mencangkok UMKM ke Rantai Pasok Industri Studi Kasus Astra dan PisAgro



Indonesia sering berbicara tentang UMKM dengan nada yang hampir religius. Mereka disebut tulang punggung ekonomi nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, dan penjaga stabilitas sosial ketika badai ekonomi datang. Semua itu benar. Namun seperti banyak mantra yang terlalu sering diulang, frasa tersebut perlahan kehilangan daya jernihnya.

Pertanyaan yang lebih penting justru jarang diajukan adalah, jika UMKM sedemikian vital, mengapa mereka tetap rapuh?

Data terbaru menunjukkan paradoks yang mengganggu. UMKM menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tetapi kredit untuk

sektor ini justru mengalami kontraksi. Pada Februari 2026, pertumbuhan kredit UMKM tercatat negatif 0,5%. Lebih menarik lagi, hampir 90% UMKM bahkan tidak mengajukan kredit. Bukan karena ditolak bank, melainkan karena merasa tidak membutuhkannya. Sementara itu, dari mereka yang mengajukan, 94% justru disetujui.

Masalahnya ternyata bukan pada pintu bank yang tertutup. Masalahnya ada pada rumah yang belum siap keluar dari halaman sendiri.

Mayoritas UMKM Indonesia masih hidup dalam ekosistem yang sangat personal. Mereka bersifat *self-funded*, *self-employed*, dan *self-owned*. Modal

berasal dari kantong sendiri. Pengelolaan usaha menyatu dengan rumah tangga. Pembukuan sering kali tidak ada. Ambisi ekspansi terbatas pada kemampuan tabungan keluarga.

Dalam kondisi seperti itu, kredit bukanlah kebutuhan. Dan ketika kredit tidak menjadi kebutuhan, pertumbuhan usaha pun berjalan lambat. Tanpa desakan untuk tumbuh, tanpa tuntutan untuk berbenah, UMKM tetap berada di zona nyaman yang justru menghambat mereka untuk naik kelas.

Di tengah kebuntuan struktural tersebut, pengalaman Astra menawarkan pelajaran yang menarik.



Pohon Rindang dan Filsafat Bisnis

Banyak perusahaan menjalankan program UMKM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Astra memilih jalan berbeda.

Muhammad Agil Muharam dari Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) mengingatkan kembali filosofi yang diwariskan pendiri Astra, William Soerjadaja.

"Kami ingin Astra berkembang dan bermanfaat seperti pohon rindang yang berguna sebagai tempat berteduh dari hujan dan panas. Singkat kata, Om William Soerjadaja ingin Astra menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, sejalan dengan tujuan Astra: Sejahtera Bersama Bangsa," katanya dalam Kajian UMKM Perbanas 2026 dan Panel Dialogue dan Rapat Umum Anggota (RUA) 2025 di Four Seasons Hotel Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Di balik metafora pohon rindang itu tersembunyi sebuah pandangan ekonomi yang jarang dibahas. Sebuah perusahaan besar tidak akan bertahan lama jika tumbuh sendirian. Ia membutuhkan ekosistem. Ia membutuhkan akar yang kuat. Dan akar itu adalah ribuan usaha kecil yang menopangnya.

Di Jepang, gagasan ini telah lama menjadi fondasi industri. Toyota tidak

hanya menjual mobil. Toyota hidup di atas jaringan ribuan pemasok kecil yang menghasilkan baut, kabel, komponen plastik, hingga sistem elektronik dengan presisi tinggi. Mereka bukan sekadar pemasok; mereka adalah perpanjangan tangan dari filosofi produksi yang sama. Ketika kualitas dipertaruhkan, seluruh rantai bertanggung jawab. Tidak ada ruang bagi usaha kecil untuk sekadar "cukupan". Astra tampaknya memahami pelajaran yang sama.

Mengubah Mentalitas Sebelum Menambah Modal

Pendekatan YDBA berbeda dari banyak program pemberdayaan yang berfokus pada pembiayaan. Bagi Astra, masalah pertama UMKM bukanlah kekurangan uang.

Masalah pertama adalah pola pikir. "Yang pertama kali dibangun adalah mentalitas atau semangat untuk berubah dan mempunyai rasa untuk saling menolong."

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya radikal. Selama bertahun-tahun, kebijakan UMKM Indonesia cenderung memperlakukan modal sebagai obat mujarab. Jika usaha kecil sulit berkembang, maka jawabannya adalah kredit murah. Jika usaha stagnan, maka solusinya subsidi bunga.

Padahal data menunjukkan kenyataan yang berbeda. Kredit tidak akan produktif

jika usaha tidak memiliki pasar yang jelas. Kredit tidak akan mendorong pertumbuhan jika pemilik usaha tidak memiliki disiplin pembukuan. Kredit bahkan dapat menjadi beban jika digunakan untuk mempertahankan usaha yang sebenarnya tidak memiliki prospek ekspansi. Dalam banyak kasus, kredit murah membuat usaha kecil bertahan lebih lama dalam kondisi stagnasi tanpa dorongan untuk berinovasi.

Karena itu YDBA memulai dari manusia, bukan dari uang. Mereka membangun disiplin. Mengajarkan pencatatan keuangan sederhana. Menanamkan budaya kualitas. Membentuk kebiasaan kerja yang konsisten. Mereka mengajak UMKM untuk melihat diri mereka sendiri dengan jujur—di mana titik lemahnya, di mana peluangnya, dan apa yang perlu diubah. Baru setelah itu akses pasar dan pembiayaan diperkenalkan.

Pendekatan ini mungkin lebih lambat. Tetapi hasilnya jauh lebih berkelanjutan, karena perubahan yang lahir dari kesadaran diri cenderung bertahan lebih lama daripada perubahan yang dipaksakan dari luar.

Dari Bengkel Kecil ke Ekosistem Industri

Perubahan mentalitas hanyalah tahap pertama. Tahap berikutnya adalah menciptakan pasar. Inilah titik yang membedakan pendekatan Astra dari banyak program pembinaan UMKM lainnya. Astra tidak membiarkan UMKM berdiri sendiri setelah pelatihan selesai. Mereka memasukkannya ke dalam rantai pasok industri yang nyata—sebuah dunia di mana standar kualitas dan ketepatan waktu adalah harga mati.

Melalui kolaborasi dengan enam Agen Pemegang Merek, termasuk Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan Astra Honda Motor, YDBA membangun jaringan usaha yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri besar.

Bengkel-bengkel kecil menjadi bagian dari jaringan layanan otomotif. Industri manufaktur skala kecil menjadi pemasok komponen. Bahkan usaha kuliner memperoleh akses ke pasar yang lebih stabil melalui penyediaan makanan bagi karyawan dan fasilitas perusahaan.

Model ini menciptakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kredit: kepastian permintaan.

Dalam ekonomi, kepastian pasar sering kali lebih penting daripada modal. Bank akan lebih mudah memberi pinjaman kepada usaha yang memiliki kontrak tetap daripada usaha yang hanya memiliki harapan. Dengan kata lain, rantai pasok menciptakan "kredibilitas" yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha informal. Pelanggan tetap, pesanan berulang, dan hubungan bisnis jangka panjang menjadi jaminan yang jauh lebih meyakinkan daripada agunan fisik semata.

Hasilnya terlihat nyata. Nilai transaksi UMKM binaan YDBA yang berhasil masuk ke perusahaan-perusahaan besar telah mencapai sekitar Rp4,8 triliun.

Angka itu bukan sekadar statistik. Ia menunjukkan bahwa UMKM Indonesia sesungguhnya mampu memenuhi standar industri modern ketika diberi pendampingan dan akses yang tepat. Mereka bukanlah anak tiri yang perlu dikasihani; mereka adalah mitra potensial yang hanya membutuhkan jembatan.

UMKM Bukan Sektor Terpisah

Inisiatif PERBANAS membentuk UMKM Center pada dasarnya mencoba mengembangkan logika yang berangkat dari gagasan sederhana: jangan memperlakukan UMKM sebagai sektor terpisah yang hidup dari subsidi. Jadikan mereka bagian dari rantai nilai industri nasional. Buat mereka terintegrasi, terukur, dan bertanggung jawab. Jadikan mereka "bankable"—layak menerima pembiayaan karena risiko bisnisnya sudah terkelola, bukan karena mereka miskin.

Riset PERBANAS memperkuat argumen ini. UMKM yang memperoleh kredit bank memiliki penjualan sekitar 72% lebih tinggi dan produktivitas 63% lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan kredit. Pencatatan keuangan meningkatkan penjualan sekitar 31% dan produktivitas 18%. Sementara digitalisasi meningkatkan penjualan sekitar 42% dan produktivitas 33%.

Namun urutannya penting. Pembukuan lebih dulu. Digitalisasi berikutnya. Akses pasar setelah itu. Kredit datang kemudian. Tanpa pembukuan, kredit buta. Tanpa pasar, kredit sia-sia. Tanpa digitalisasi, efisiensi terhambat. Urutan ini harus dipahami oleh semua pemangku kebijakan.

Indonesia terlalu lama membalik urutan tersebut. Kredit digelontorkan sebelum sistem penilaian risiko terbentuk. Subsidi bunga diberikan tanpa perbaikan tata kelola usaha. Akibatnya, kredit tidak produktif dan risiko kredit macet meningkat.

Dari Kaum Marginal Menjadi Mitra Industri

Di balik seluruh diskusi mengenai kredit, digitalisasi, dan rantai pasok, sesungguhnya terdapat persoalan yang lebih mendasar.

Banyak pelaku usaha mikro masih merasa asing terhadap sistem ekonomi formal. OJK bahkan mencatat adanya pelaku usaha yang merasa begitu canggung memasuki bank hingga melepaskan sepatu sebelum masuk ke gedung bank. Kisah itu mungkin terdengar lucu. Padahal sesungguhnya tragis. Ia menggambarkan jarak psikologis antara negara modern dan jutaan pelaku ekonomi kecil yang seharusnya menjadi bagian darinya.

Ketidakmampuan memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, ketidaktahuan tentang prosedur pembiayaan, dan ketakutan terhadap institusi formal adalah hambatan yang

tidak kalah berat dibandingkan agunan fisik. Ini adalah hambatan kultural yang memerlukan pendekatan pendidikan dan pendampingan jangka panjang.

Karena itu keberhasilan UMKM tidak bisa diukur hanya dari jumlah kredit yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mereka berhasil bertransformasi dari pelaku ekonomi pinggiran menjadi bagian dari ekosistem produksi nasional. Apakah mereka mulai memiliki laporan keuangan? Apakah mereka memiliki rekening usaha terpisah? Apakah mereka mampu mengakses pembiayaan tanpa perantara? Itulah indikator sesungguhnya dari kemajuan.

Di sinilah pendekatan Astra menawarkan pelajaran berharga. Mereka tidak memulai dengan uang. Mereka memulai dengan manusia. Mereka tidak sekadar memberi modal. Mereka menciptakan pasar. Dan mereka tidak membina UMKM agar tetap kecil dan bergantung, melainkan agar mampu berdiri sebagai mitra industri yang sejajar.

Dalam ekonomi modern, itulah perbedaan antara bantuan dan pembangunan. Bantuan membuat seseorang bertahan hidup. Pembangunan membuat seseorang mampu tumbuh.

Dan bagi Indonesia yang sedang mencari cara mengangkat jutaan UMKM keluar dari jebakan informalitas, mungkin itulah pelajaran paling penting yang dapat dipetik dari Astra: bahwa kebangkitan usaha kecil tidak lahir dari kredit semata, melainkan dari perpaduan antara mentalitas, disiplin, pasar, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.

Ketika rantai pasok terbangun dan standar kualitas mulai diterapkan, UMKM tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai tulang punggung yang sesungguhnya—tegap, produktif, dan mampu bertahan dalam angin perubahan ekonomi global. (*)



Mengangkat Petani dari Lahan Abu-abu

Sektor pertanian menyimpan anomali yang membingungkan. Indonesia dikenal memiliki lahan pertanian terbaik di Asia Tenggara, tetapi produktivitasnya kerap kalah bersaing dengan Vietnam. Insan Syafaat mengidentifikasi akar masalahnya: "Sektor pertanian kita didominasi kelompok petani yang berada di 'lahan abu-abu', antara kategori merah (berisiko) dan hijau (aman)," katanya.

Insan Syafaat, Direktur Eksekutif *Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture* (PISAgro) yang mengaku mengelola 11 komoditas beranggotakan 2,8 juta petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menceritakan dengan gamblang tantangan yang dihadapi institusinya.

PISAgro adalah perkumpulan perusahaan agrobisnis dari hulu hingga hilir, termasuk raksasa pangan seperti Indofood, yang berkomitmen membangun kesejahteraan petani. "Kami mempunyai 11 komoditas strategis yang kami kelola, dengan 2,8 juta petani menjadi partner PISAgro dari total 19 ribu desa di seluruh Indonesia," jelas Insan Kamis (18/6/2026) dalam Panel Dialogue yang digelar dalam rangkaian Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS 2026 di Four Seasons Hotel Jakarta.

Inclusive Closed Loop: CSV Bukan CSR

Menurut Insan, pendekatan yang dilaksanakan PISAgro dilakukan secara multipihak yang ada di rantai pasok. Mereka menyebutnya dengan nama Inclusive Closed Loop.

"Ketika sudah ada transaksi bisnis, seketika itu ada pendampingan kepada kawan-kawan petani. Kami menempatkan kawan-kawan petani di model ini karena memberikan jaminan yang paling baik. Dari akses pasar lebih luas hingga akses pendanaan," paparnya.

Perbedaan mendasarnya terletak pada filosofi yang mereka yakini, atau pendiri yakini, "Yang kami lakukan adalah *Creating Shared Value* (CSV), bukan sekadar *Corporate Social Responsibility* (CSR)."

Selain akses pasar dan pendanaan, PISAgro juga memberikan akses teknologi. "Teknologi AI adalah hal yang penting bagi petani dalam melengkapi *Inclusive Closed Loop*," tambah Insan.

Meskipun telah ada ekosistem yang kuat, tantangan terbesar adalah status petani yang masih berada di lahan abu-abu. "Apakah kita bisa menghasilkan sebuah skema sehingga para petani bisa *bankable*? Untuk itu kami memerlukan dukungan pemerintah agar para petani mendapatkan skema pembiayaan yang layak," ujarnya.

Peran Perbankan: Digitalisasi dan Akses Pembiayaan

Antonius Widodo Mulyono, Direktur PT Bank Central Asia, Tbk sebelumnya juga memperkuat apa yang dikatakan Insan. Menurut dia, dari perspektif perbankan swasta terbesar, ceruk pasar UMKM di Indonesia sangat masif. Atau mencakup sekitar 30 juta pelaku usaha di level mikro dan menengah.

"UMKM pada dasarnya sangat seksi. Kontribusi pada PDB sampai 60%. Ceruk pasar untuk perbankan sangat dalam," ungkap Antonius.

BCA merespons potensi ini dengan memperkuat tiga pilar digital: myBCA, Merchant BCA, dan QRIS, yang kini mencatatkan frekuensi transaksi agregat hingga 8 miliar rupiah. "Para pelaku UMKM diberi ruang sehingga bisa melakukan *invoicing* hingga urusan pajak secara digital," jelasnya.

Lewat program Bakti BCA, bank ini mendesain pembinaan berlapis dari level desa hingga siap ekspor (Go Nasional, Go Digital, Go Global).

"Kami bahkan memberikan Award Desa Bakti BCA, seperti *Asean Sustainable Tourism Award 2026*. Lewat desa binaan, desa wisata bisa masuk ke platform BCA sehingga pengunjung bisa langsung melakukan promo-promo," papar Antonius.

Komitmen ekspor BCA telah menembus nilai Rp100 miliar melalui komunitas BCA Bangga Lokal, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kadin. Tahun ini, BCA UMKM Fest akan digelar sebagai ajang promosi bagi bisnis UMKM.

Berbagai skema pembiayaan khusus diberikan, termasuk dukungan KUR dengan suku bunga menarik bagi sektor material dan developer. (*)

Menakar Visi Pusat Finansial Internasional: Prospek dan Tantangan bagi Indonesia



Pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kembali menorehkan sejarah baru bagi arsitektur ekonomi Indonesia.

Salah satu terobosan paling ambisius dan mengundang atensi publik adalah amanat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Kebijakan ini secara eksplisit dirancang oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan visi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, inisiatif ini ditujukan untuk mendorong pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan. Di tengah persaingan arus modal global yang makin ketat, kehadiran sebuah pusat finansial (*financial center*) bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan infrastruktur vital untuk menarik investasi, menumbuhkan industri dana kelola kekayaan (*wealth management*), serta memperkuat daya saing perbankan domestik.

Di sini kita akan mengupas bagaimana praktik negara-negara terkemuka

membangun *financial center*, menakar prospek bagi Indonesia pasca-UU P2SK 2026, menganalisis ruang perbaikan atau kelemahan dari beleid tersebut, serta membedah kontribusi konkretnya bagi sektor keuangan nasional.

Praktik Global: Resep Sukses Singapura hingga Dubai

Membangun sebuah International Financial Center (IFC) yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar gedung pencakar langit dan logo bank multinasional. Merujuk pada kajian dan praktik di negara-negara yang

telah sukses seperti Singapura dan Uni Emirat Arab (melalui Dubai International Financial Centre/DIFC), ada beberapa prasyarat fundamental yang mendasari keberhasilan mereka.

Pertama, otonomi dan kepastian hukum. Keberhasilan DIFC di Dubai didorong oleh kerangka institusional yang sangat jelas, di mana mereka mengadopsi sistem hukum *common law* berbahasa Inggris, yang menyediakan yurisdiksi pengadilan khusus (DIFC Courts) yang terpisah dari sistem hukum perdata Uni Emirat Arab.

Kepastian hukum ini mengurangi friksi operasional dan menumbuhkan rasa percaya (*trust*) yang sangat diidamkan oleh investor global. Kecepatan dan prediktabilitas (*speed and predictability*) menjadi dua mata uang utama dalam industri keuangan lintas batas.

Kedua, sinergi institusional. Model kesuksesan Singapura berpusat pada *Monetary Authority of Singapore* (MAS) yang menyatukan fungsi pengawasan sekaligus promosi sektor keuangan secara terpadu bersama dewan ekonomi lainnya. Sinergi ini meminimalkan tumpang tindih birokrasi dan menciptakan arah kebijakan yang koheren.

Ketiga, insentif fiskal dan talenta global. Baik Dubai maupun Singapura menawarkan insentif pajak yang transparan, kemudahan visa jangka panjang, serta ekosistem yang ramah bagi ekspatriat.

Sebuah pusat finansial adalah magnet bagi talenta-talenta terbaik—mulai dari *deal makers*, spesialis *compliance*, hingga manajer portofolio investasi global. *Financial center* bukan hanya soal regulasi, melainkan soal manusia dan ekosistem yang melingkupinya.

Desain PFII dalam UU P2SK 2026: Peluang dan Prospek

Belajar dari praktik global tersebut, landasan yang dibangun oleh UU No

4 Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mencatat dengan baik prasyarat kesuksesan sebuah *financial center*. Secara spesifik, desain PFII diatur dalam Pasal 248A yang merupakan pasal sisipan antara Bab XVIII dan XIX.

Pemerintah menyadari pentingnya otonomi, sehingga PFII didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu. Hal yang patut digarisbawahi, wilayah ini akan mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, dan/atau menyesuaikan dengan prinsip dan/atau standar internasional.

Ini adalah sinyal kuat bahwa PFII akan berupaya menyamai tingkat kenyamanan berbisnis (*ease of doing business*) yurisdiksi kelas dunia. Pemerintah juga berwenang untuk menetapkan satu atau lebih Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Artinya, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan multi-hub. Ruang lingkup usahanya pun sangat luas, mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, hingga kegiatan usaha sektor lainnya.

Pengelolaan wilayah ini akan diserahkan kepada sebuah dewan khusus, yakni dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Untuk menarik para pelaku pasar global, Undang-Undang ini juga mengamankan insentif yang konkret.

Dalam rangka mencapai tujuan PFII, seluruh kegiatan usaha di wilayah ini akan diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya.

Insentif fiskal ini akan menjadi 'pemanis' utama bagi bank investasi asing, manajer investasi, pendiri *family office*, hingga perusahaan teknologi finansial global untuk memarkir dananya di Indonesia.

Menakar Kekurangan dan Tantangan Implementasi

Meskipun visi yang tertuang dalam UU 4/2026 sangat menjanjikan, terdapat beberapa catatan kritis dan potensi kekurangan yang harus dimitigasi oleh para pembuat kebijakan.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bahwa pengaturan operasional PFII tidak diperinci lebih jauh di dalam batang tubuh UU P2SK ini. Pasal 248A ayat (7) hanya mendelegasikan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan PFII diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak UU 4/2026 ini diundangkan.

Pertama, tenggat waktu tiga bulan untuk merumuskan sebuah Undang-Undang tersendiri (*Lex Specialis*) tentang PFII adalah waktu yang sangat ambisius. Hal ini rentan menghasilkan regulasi yang prematur jika tidak dibahas secara komprehensif bersama pakar dan pelaku industri global. Ketidakpastian arah kebijakan di masa krusial ini dapat membuat investor mengambil sikap *wait-and-see*.

Kedua, benturan sistem hukum. Meskipun UU P2SK menyatakan PFII akan memiliki "kekhususan hukum tertentu" yang mengadopsi standar internasional, mengintegrasikan prinsip hukum peradilan bisnis global ke dalam ekosistem hukum perdata peninggalan kolonial (Eropa Kontinental) Indonesia bukanlah perkara sederhana.

Diperlukan landasan konstitusional yang kuat untuk memastikan putusan pengadilan khusus di PFII kelak benar-benar independen, memiliki kekuatan eksekusi lintas batas, dan bebas dari intervensi peradilan umum yang selama ini kerap dikeluhkan oleh investor.

Ketiga, ekosistem talenta. Regulasi pajak dan hukum hanyalah infrastruktur keras. Tantangan infrastruktur lunak adalah



memastikan ekosistem sosial—mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan internasional, hingga kemudahan imigrasi—dapat memikat *world-class talent*.

Tanpa talenta global yang menetap dan beraktivitas di PFII, wilayah tersebut berisiko hanya akan menjadi sekumpulan entitas perusahaan cangkang (*shell companies*) yang memburu insentif pajak tanpa menciptakan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

Kontribusi Konstruktif bagi Sektor Keuangan Nasional

Jika tantangan implementasi tersebut dapat diurai, kehadiran PFII akan memberikan kontribusi transformatif bagi arsitektur sektor keuangan Indonesia. Beberapa hal ini dapat mendorong ekosistem keuangan di Indonesia:

1. Memperdalam Pasar Keuangan Domestik.

Kehadiran institusi keuangan global di PFII akan membawa likuiditas melimpah dan produk finansial yang jauh lebih

kompleks dan inovatif. Likuiditas tersebut pada gilirannya dapat disalurkan untuk pembiayaan proyek-proyek riil strategis nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri yang rentan terhadap volatilitas kurs.

2. Katalisator ekosistem universal banking.

Di tengah tren konsolidasi bank, bank-bank nasional akan memiliki kesempatan emas untuk bersindikasi, berkolaborasi, atau menjadi mitra distribusi/kustodian bagi dana-dana besar yang mengalir melalui PFII. Hal ini memperkuat model bisnis universal banking yang memadukan fungsi intermediasi dengan kapabilitas investasi *cross-border*.

3. Mendorong Inovasi dan Kapasitas SDM.

Alih teknologi dan pengetahuan (*knowledge transfer*) akan terjadi secara masif. Eksekutif dan talenta perbankan nasional akan terekspos pada standar kerja berkelas dunia, mempercepat adopsi teknologi finansial, dan mengasah

teknik manajemen risiko ke level yang lebih tinggi.

4. Pusat "Family Office" dan Repatriasi Aset.

Dengan kemudahan perpajakan dan kepastian hukum yang kuat, PFII berpotensi menahan keluarnya modal dari *High Net Worth Individuals* (HNWI) asal Indonesia yang selama ini banyak ditempatkan di negara tetangga. Bahkan, kawasan ini dapat diproyeksikan untuk menarik kekayaan dari seluruh kawasan Asia Tenggara agar dikelola di dalam negeri.

Pengesahan UU 4/2026 meletakkan fondasi yuridis yang sangat krusial melalui penciptaan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dengan dijaminnya kemandirian administrasi, fleksibilitas perpajakan, serta tekad mengadopsi standar global, Indonesia kini memiliki instrumen legal yang solid untuk bersaing *head-to-head* dengan raksasa pusat keuangan regional.

Namun, ujian sesungguhnya berada pada penyelesaian aturan turunan dan Undang-Undang khusus dalam tenggat waktu tiga bulan yang dijanjikan. Keberhasilan PFII pada akhirnya tidak akan diukur semata-mata dari seberapa megah rancangan undang-undangnya, melainkan dari seberapa konsisten negara ini menggaransi independensi hukum, efisiensi operasional, serta ekosistem yang dapat dipercaya oleh arus modal global.

Jika hal itu dapat diwujudkan dengan sempurna, PFII tidak hanya akan memperkaya perbankan nasional, tetapi juga menjadi instrumen penentu kedaulatan ekonomi Indonesia pada masa depan. (*)



BNP PARIBAS

PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA

Sequis Tower Level 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B Jakarta 12190, Indonesia

Tel: 62-21 – 5081.4789 (Hunting) Fax: 62-21-5081.4790, www.bnpparibas.co.id

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA

Sesuai pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang no.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT. BNP Paribas Indonesia mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2025 sebagai berikut:

USD 5.199.300 setara dengan Rp 83.682.736.720.

Keterangan :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengumuman Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih ini tidak mengurangi kewajiban Debitur kepada Bank dan Bank akan tetap berupaya melakukan penagihan sampai Debitur menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Bank.
3. Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya II Jakarta Selatan II, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.



**UMKM CENTER
PERBANAS**

Membangun Ekosistem agar UMKM Naik Kelas

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 60 persen dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Namun, di balik besarnya peran tersebut, masih terdapat tantangan mendasar yang menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai pengembangan UMKM sering kali berfokus pada persoalan akses pembiayaan. Semakin besar penyaluran kredit dianggap sebagai indikator utama keberhasilan penguatan sektor ini. Namun hasil kajian terbaru yang dilakukan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Persoalan utama yang dihadapi banyak UMKM ternyata bukan semata-mata keterbatasan akses kredit, melainkan kesiapan usaha untuk tumbuh, berekspansi, dan memanfaatkan pembiayaan secara produktif.

Temuan inilah yang melatarbelakangi pembentukan UMKM Center PERBANAS, sebuah *platform* kolaborasi yang dirancang untuk membantupelakuusahamemperkuat kapasitas bisnis, meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses pasar, mendorong digitalisasi, serta mempersiapkan diri menjadi lebih bankable.

UMKM Center resmi diluncurkan bertepatan dengan Rapat Umum Anggota (RUA) PERBANAS Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Kehadiran pusat pengembangan ini menandai pendekatan baru dalam pemberdayaan UMKM, yakni melalui

pembangunan ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Peluncuran UMKM Center dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Umum PERBANAS Hery Gunardi, Ketua Dewan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo, dan Deputi Komisiner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah.

Ketua Umum PERBANAS Hery Gunardi menegaskan bahwa peran industri perbankan dalam



pengembangan UMKM tidak dapat dibatasi hanya pada penyediaan pembiayaan. "Perbankan tidak hanya bicara soal pembiayaan. Akses kredit memang penting, tetapi belum tentu menjamin keberhasilan usaha. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, akses ke pasar, daya saing, pendampingan, edukasi, dan keberlanjutan usaha UMKM," ujarnya.

Menurut Hery, selama ini terdapat anggapan bahwa rendahnya pembiayaan UMKM disebabkan oleh keterbatasan pasokan kredit dari perbankan. Namun hasil kajian PERBANAS justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Pertumbuhan kredit UMKM memang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat mengalami kontraksi ketika kredit perbankan secara keseluruhan masih tumbuh positif. Akan tetapi, penyebab

utamanya bukan karena bank tidak menyalurkan kredit, melainkan karena sebagian besar pelaku usaha belum mengajukan pembiayaan.

"Temuan kami menunjukkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri," kata Hery.

Tingginya tingkat persetujuan kredit bagi UMKM yang mengajukan pembiayaan memperkuat temuan tersebut. Artinya, persoalan utama bukan berada pada akses kredit, melainkan pada rendahnya kesiapan usaha untuk berkembang dan memanfaatkan sumber pembiayaan formal.

Atas dasar itu, PERBANAS memandang bahwa strategi pengembangan UMKM perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penyaluran kredit menuju pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan menempatkan peningkatan kapasitas usaha sebagai prioritas utama.

Tantangan Struktural

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan PERBANAS Aviliani menjelaskan, hasil kajian awal menunjukkan sekitar 88 persen pelaku UMKM masih mengandalkan dana pribadi sebagai sumber utama pembiayaan usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki dorongan ekspansi yang kuat. Selama kebutuhan usaha masih dapat dipenuhi dari modal

sendiri, mereka cenderung belum melihat urgensi untuk mengakses pembiayaan eksternal.

"Ini menunjukkan mayoritas pelaku usaha masih merasa nyaman menggunakan modal sendiri. Padahal ketika ingin berkembang dan melakukan ekspansi, mereka pasti membutuhkan pembiayaan yang lebih besar," ujarnya.

PERBANAS juga menemukan bahwa tingkat kenaikan kelas UMKM masih relatif rendah. Meskipun nilai kredit UMKM terus bertambah setiap tahun, jumlah pelaku usaha yang berhasil berkembang dari usaha mikro menjadi kecil atau dari kecil menjadi menengah belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut Aviliani, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan saja tidak cukup untuk menciptakan transformasi usaha. Yang lebih dibutuhkan adalah penciptaan permintaan yang mendorong UMKM berkembang secara organik.

"Kalau UMKM tidak naik kelas, mereka tidak mungkin terus menerus meminjam. Justru yang kita dorong adalah bagaimana mereka berkembang, melakukan ekspansi, dan pada akhirnya membutuhkan pembiayaan yang lebih besar secara alami," katanya.

Kajian PERBANAS juga mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural yang masih dihadapi pelaku UMKM. Sebagian besar usaha masih bersifat keluarga, dengan sekitar 95 persen tenaga kerjanya berasal dari anggota keluarga sendiri. Banyak di antaranya belum menerapkan sistem penggajian formal dan masih mengandalkan mekanisme pembagian keuntungan.

Selain itu, sekitar 75 persen pelaku UMKM masih menjalankan usaha

secara perorangan tanpa melibatkan mitra usaha maupun investor. Pola pengelolaan yang sangat bergantung pada pemilik menyebabkan ruang pertumbuhan usaha menjadi terbatas.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya pencatatan keuangan. Banyak pelaku usaha belum memiliki laporan keuangan yang memadai, belum memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta belum menerapkan administrasi bisnis yang baik. Padahal, aspek tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam proses analisis kredit oleh perbankan.

Karena itu, UMKM Center PERBANAS akan memberikan pendampingan yang mencakup pembukuan sederhana, tata kelola usaha, digitalisasi transaksi, penguatan kapasitas bisnis, hingga peningkatan akses pasar.

Persoalan "Demand Side"

Peluncuran UMKM Center juga dibarengi dengan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan PERBANAS. *Chief Economist* PERBANAS Winang Budoyo menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM mulai melemah sejak akhir 2022, dan memasuki zona negatif pada akhir 2025. Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih mengalami kontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut berbeda dengan tren kredit perbankan secara umum yang masih tumbuh positif, baik pada kredit modal kerja, investasi, maupun konsumsi.

Menurut Winang, penelitian PERBANAS menemukan bahwa hampir 90 persen UMKM formal dan informal tidak mengajukan kredit karena merasa belum membutuhkan

pinjaman. Sementara itu, sebagian besar pembiayaan usaha masih bersumber dari dana pribadi.

"Fakta ini mengonfirmasi persoalan utama bukan terletak pada penolakan bank, melainkan pada rendahnya permintaan kredit baru, terbatasnya dorongan ekspansi usaha, dan belum kuatnya kesiapan UMKM untuk mengakses pembiayaan formal," kata Winang.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM Indonesia masih sangat pemilik-sentris. Banyak usaha beroperasi dalam skala ultramikro, menggunakan tenaga kerja keluarga, dan belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Berdasarkan hasil kajian dan serangkaian FGD, PERBANAS merekomendasikan penguatan ekosistem usaha melalui peningkatan kualitas pembukuan, digitalisasi transaksi, pengembangan rantai pasok, serta penyediaan model pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen UMKM.

Agenda OJK: Penguatan UMKM
Temuan PERBANAS sejalan dengan berbagai kajian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun nilai kredit UMKM terus meningkat dan telah mencapai sekitar Rp1.501 triliun, porsi terhadap total kredit perbankan nasional justru mengalami tren penurunan karena pertumbuhan kredit korporasi dan komersial berlangsung lebih cepat.

OJK juga mencermati adanya perubahan struktur pembiayaan UMKM pascapandemi Covid-19. Kredit pada segmen mikro kini semakin dominan, sementara porsi pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah cenderung menurun.

Dalam berbagai kajian regulator, tantangan utama UMKM masih berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan, lemahnya kualitas pembukuan, belum terpisahnya keuangan usaha dan pribadi, serta keterbatasan akses pasar.

OJK menilai bahwa persoalan pengembangan UMKM saat ini tidak lagi hanya terkait akses pembiayaan. Banyak pelaku usaha yang telah berkembang justru menghadapi tantangan memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing.

Karena itu, regulator mendorong pengembangan pembiayaan berbasis teknologi, pemanfaatan *credit scoring* alternatif, serta perluasan *supply chain financing* yang memungkinkan invoice atau tagihan usaha digunakan sebagai dasar pembiayaan tanpa harus bergantung pada aset tetap sebagai agunan.

Melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025, OJK juga memperluas ruang bagi

pengembangan berbagai model pembiayaan inovatif sekaligus memperkuat ekosistem UMKM secara menyeluruh. Regulator menegaskan bahwa keberhasilan meningkatkan pembiayaan UMKM hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Penghubung dalam Ekosistem UMKM

Di tengah berbagai tantangan tersebut, UMKM Center PERBANAS hadir sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai ekosistem pendukung yang dibutuhkan untuk berkembang. Program yang dijalankan tidak hanya mencakup edukasi dan pendampingan, tetapi juga penguatan akses pasar, integrasi ke dalam rantai pasok, perluasan jejaring usaha, serta konektivitas dengan industri perbankan dan lembaga pendukung lainnya.

PERBANAS juga akan berkolaborasi dengan bank-bank anggota,

kementerian dan lembaga, asosiasi usaha, perusahaan besar, serta berbagai organisasi yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan UMKM.

Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, UMKM Center diharapkan mampu mempercepat lahirnya UMKM yang lebih produktif, formal, kompetitif, dan siap mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan UMKM naik kelas tidak hanya akan menciptakan permintaan kredit yang lebih sehat bagi industri perbankan, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi PERBANAS, UMKM Center merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem yang memungkinkan semakin banyak pelaku usaha Indonesia berkembang, memperluas skala usahanya, dan menjadi bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. (*)



Menjadikan UMKM Indonesia "Bankable", Terintegrasi dengan Industri dan Berdaya Saing Global



Di atas kertas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, di lapangan, raksasa ini tengah mengalami anemia akut di sektor pembiayaan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026 mengungkapkan kondisi yang mengkhawatirkan: pertumbuhan kredit UMKM berada

di zona negatif, yakni -0,47% secara tahunan (*year-on-year*).

Kontras dengan kredit umum yang tetap tumbuh positif, porsi kredit UMKM dalam portofolio perbankan terus merosot, dari 21,25% pada 2022 menjadi hanya 17,13% di awal tahun 2026. Target penyaluran KUR juga tidak tercapai pada tahun lalu.

Sementara itu, lesunya daya beli pascapandemi dan tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM yang menyentuh angka 4,34% pada 2025

membuat industri perbankan ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit. UMKM juga tidak terlalu berminat menarik pinjaman karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Mereka masih sanggup mendanai kegiatan usaha dari kocek sendiri (*self-funded*).

Tekanan di dua sisi yang datang bersamaan, yakni *supply side* (kreditur/bank) dan *demand side* (debitur/UMKM), menjadi *alarm* bersama bagi banyak pihak untuk urun rembuk mencari solusi. Untuk

itu, Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) menggelar Panel Dialogue dan meresmikan UMKM Center pada Rapat Umum Anggota (RUA) 2026 di Four Seasons Hotel Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Mengusung tema besar “Revitalisasi Bisnis Model UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi Nasional”, forum yang dimoderatori oleh *Chief Economist* PERBANAS, Winang Budoyo, ini melahirkan sebuah cetak biru penting: pendirian UMKM Center oleh PERBANAS.

Lembaga ini bertujuan mengintegrasikan usaha rakyat dengan industri besar, meniru model rantai pasok ala Jepang yang menyokong raksasa otomotif dunia seperti Toyota, misalnya.

Berikut adalah pokok-pokok pemikiran dari empat tokoh kunci yang menjadi narasumber dalam upaya meretas jalan UMKM menuju status *bankable*:

Fondasi Mentalitas dan Rantai Pasok Terukur

Muhammad Agil Muharam dari Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) menjelaskan, bagi Astra, memajukan UMKM bukanlah sekadar program pemanis citra korporat, melainkan perwujudan filosofi sang pendiri.

“Kami ingin Astra berkembang dan bermanfaat, seperti pohon rindang yang menjadi tempat teduh dari hujan dan panas. Singkat kata, seperti pendiri perusahaan kami, Oom William Soerjadaja, ingin Astra menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, sejalan dengan tujuan Astra: “Sejahtera Bersama Bangsa,” ujar Agil Muharam.

YDBA membedah akar masalah UMKM bukan dari modal, melainkan dari pola pikir. “Yang pertama kali dibangun adalah mentalitas atau semangat untuk berubah dan memiliki rasa saling menolong,” tegasnya.

Melalui lima kriteria asesmen yang ketat, hingga tahun 2025 YDBA telah membina lebih dari 2.000 UMKM, dengan sektor manufaktur sebagai penyerap tertinggi.

Strategi ini terbukti konkret. Berkolaborasi dengan enam Agen Pemegang Merek (APM) seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan AHM, YDBA sukses membangun rantai pasok yang presisi. Hasilnya fantastis, nilai transaksi UMKM binaan YDBA yang masuk ke perusahaan besar telah menembus angka Rp4,8 triliun.

Digitalisasi Massal dan Injeksi Ekonomi Lokal

Antonius Widodo Mulyono, Direktur PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) membagi pengalaman terbaik institusinya. Dari perspektif perbankan swasta terbesar, ceruk pasar UMKM di Indonesia sangat masif, atau mencakup sekitar 30 juta pelaku usaha di level mikro dan kecil.

BCA merespons potensi besar ini dengan memperkuat tiga pilar digital: myBCA, Merchant BCA, dan QRIS, yang kini mencatatkan frekuensi transaksi agregat hingga 8 miliar transaksi. “Para pelaku UMKM diberi ruang sehingga bisa melakukan invoicing hingga urusan pajak secara digital,” kata Antonius Widodo.

Melalui payung program Bakti BCA, bank ini mendesain program pembinaan berlapis dari tingkat desa hingga siap ekspor (*Go Nasional, Go Digital, Go Global*). Lewat digitalisasi Desa Wisata binaan, yang bahkan meraih penghargaan Asean Sustainable Tourism Award 2026, BCA mengintegrasikan promosi langsung ke *platform* perbankan mereka.

BCA juga meluncurkan komunitas BCA Bangga Lokal dan menggandeng Kementerian Perdagangan



serta Kadin untuk membuka gerbang pasar internasional. Komitmen ekspor ini telah menembus nilai Rp100 miliar.

Menutup paparannya, Antonius menjanjikan gelaran BCA UMKM Fest tahun ini serta kesiapan skema pembiayaan khusus berbiaya murah, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga menarik bagi sektor material dan pengembang.

Literasi, Regulasi, dan Perlindungan Regulator

Titi Safitri Nasution, Deputy Direktur Pengembangan UMKM OJK tak kalah mangkus dan sangkil menceritakan sepak terjang OJK, yang membawa perspektif yang humanis sekaligus penuh tantangan struktural.

Di satu sisi, per April 2026, ada angin segar berupa kenaikan tipis kredit UMKM sebesar 0,16% (yoy) yang didorong oleh peralihan ke sektor mikro. Namun di sisi lain, jurang literasi keuangan masih terlalu dalam.

"Rendahnya literasi keuangan membuat sebagian pelaku usaha mikro tidak berani masuk ke bank. Bahkan ada yang sampai melepas sepatu saat hendak masuk bank karena takut," ungkap Titi Safitri, mencerminkan beban psikologis kaum marginal terhadap institusi formal.

Masalah mendasar lainnya adalah ketidakmampuan pelaku usaha memisahkan keuangan pribadi dan bisnis akibat keterbatasan kapasitas operasi. Untuk mengurai benang kusut ini, OJK meluncurkan POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Regulasi ini menjadi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB)

untuk menyederhanakan seluruh tahapan pembiayaan. Kebijakan ini diturunkan langsung dari visi Asta Cita Pemerintah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi dan pembiayaan berbasis rantai pasok (*supply chain financing*).

Ekosistem Pertanian Melalui Inclusive Closed Loop

Insan Syafaat, Direktur Eksekutif *Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture* (PISAgro) juga tak mau ketinggalan. Segendang sepenarian dengan tiga pematari sebelumnya, institusi tempatnya mengabdikan beralih ke sektor pangan. PISAgro, yang mengonsolidasikan perusahaan agrobisnis dari hulu ke hilir, termasuk raksasa pangan seperti Indofood, menyoroti anomali produktivitas pertanian nasional.

Indonesia dikenal memiliki tanah terbaik di Asia Tenggara, tetapi produktivitasnya kerap kalah bersaing dengan Vietnam. Hal ini terjadi karena petani Indonesia cenderung kesulitan menjaga konsistensi.

Selain itu, ada kiat lain yang dikemukakan, atau kongkritnya, kuncinya ada pada kepastian ekosistem. PISAgro tercatat mengelola 11 komoditas strategis dengan merangkul 2,8 juta petani di 19.000 desa lewat pendekatan *Inclusive Closed Loop*.

"Kami menerapkan prinsip *Creating Shared Value* (CSV), bukan sekadar *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketika sudah ada transaksi bisnis, seketika itu juga ada pendampingan, jaminan pasar yang lebih luas, akses pendanaan, hingga adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) bagi petani," jelas Insan Syafaat.

Tantangan terbesar saat ini adalah posisi petani yang berada di "lahan abu-abu", berada di antara kategori merah (berisiko) dan hijau (aman). Karena itu PISAgro mendesak pemerintah agar menciptakan skema pembiayaan khusus yang adaptif guna mengangkat status para petani agribisnis ini agar dapat dikategorikan sebagai sektor yang *bankable*.

Menuju Harmonisasi Industri Ala Jepang

Langkah PERBANAS menginisiasi UMKM Center adalah jembatan krusial untuk mengakhiri fragmentasi ekonomi. Belajar dari kesuksesan korporasi global di Jepang, keberhasilan industri skala masif tidak berdiri sendiri. Ini semua terjadi sebab mereka ditopang oleh ribuan UMKM yang disiplin, presisi, dan memiliki akses modal yang sehat di dalam lingkaran ekosistem tertutup (*closed-loop model*).

Melalui kolaborasi lintas sektor yang dihadirkan dalam Panel Dialogue ini, mulai dari pembentukan mentalitas ala Astra, infrastruktur transaksi digital BCA, perlindungan regulasi OJK, hingga jaminan pasar agribisnis PISAgro, revitalisasi UMKM Indonesia bukan lagi sekadar target angka penyaluran kredit.

Ini adalah gerakan struktural untuk menaikkan kelas kaum marginal, memastikan roda ekonomi nasional berputar lebih adil, bertenaga, dan berkelanjutan. (*)

Menyeimbangkan Kemudi Moneter: BI Rate dan Daya Tahan Perbankan



Di sudut-sudut pusat bisnis Sudirman-Thamrin Jakarta, ketegangan tersirat di wajah para pelaku pasar yang terus menatap layar pergerakan kurs rupiah. Berita dari Timur Tengah mengenai eskalasi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran seolah mengirimkan gelombang kejutan tanpa jeda ke pasar finansial domestik. Bagi industri perbankan tanah air, fluktuasi global ini bukan lagi sekadar angka di lembar berita, melainkan tantangan nyata yang mulai merembes masuk ke dalam pembukuan mereka.

Langkah cepat akhirnya diambil oleh otoritas moneter. Bank Indonesia (BI) melalui keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pertengahan Juni 2026 menetapkan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Kenaikan ini diikuti dengan penyesuaian suku bunga *deposit facility* menjadi 4,75% dan *lending facility* menjadi 6,5%. Langkah *forward-looking* ini sengaja ditempuh untuk meredakan potensi gejolak harga di dalam negeri agar inflasi tetap berlabuh pada sasaran

target pemerintah sebesar 1,5% hingga 3,5%.

Kenaikan di bulan Juni ini merupakan puncak dari rangkaian pengetatan moneter agresif yang tidak biasa. Hanya dalam kurun waktu satu bulan, suku bunga acuan telah dikerek naik sebanyak tiga kali dengan total akumulasi mencapai 100 bps. Rentetan kebijakan ini bermula dari keputusan RDG pada 20 Mei 2026 yang menaikkan suku bunga sebesar 50 bps menjadi 5,25%, lalu disusul keputusan luar biasa lewat RDG mingguan pada 9 Juni 2026 yang menaikkannya kembali sebesar 25 bps ke level 5,5%.

Intervensi darurat melalui RDG mingguan tersebut menjadi respons cepat ketika nilai tukar rupiah sempat mengalami depresiasi yang cukup tajam hingga bertengger di level Rp18.171 per dolar AS, yang mana berada di luar kalkulasi awal pasar. Guna menahan laju pelemahan, BI sengaja memperlebar selisih (*spread*) suku bunga dengan bank sentral AS, The Fed, yang saat ini mempertahankan suku bunganya di kisaran 3,5% - 3,75%. Jarak

sebesar 200 bps ini diharapkan mampu mengembalikan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor global.

Badai Geopolitik Global dan Tekanan Fiskal

Akar dari pengetatan moneter yang masif ini sebagian besar dipicu oleh faktor eksternal. Tensi geopolitik yang memanas di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, yang secara otomatis mentransmisikan risiko inflasi ke berbagai belahan dunia. Fenomena ini memicu penguatan dolar AS secara global (*broad dollar*) sekaligus mengerek imbal hasil (*yield*) surat utang global, yang kemudian mendorong terjadinya pelarian modal (*capital outflow*) dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap aman (*safe haven*).

Namun, di samping faktor global, para pelaku pasar juga menyoroti kondisi domestik. Pergerakan rupiah juga mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pembengkakan subsidi energi akibat mahalnya harga minyak brent (yang diperkirakan menambah beban fiskal sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan USD 1 per barel) berjalan bersamaan dengan belanja besar program-program prioritas pemerintah. Isu tata kelola pada beberapa badan pangan baru pun turut menjadi perhatian para pelaku pasar modal global.

Dalam situasi ini, kebijakan BI menaikkan suku bunga berfungsi ganda yakni sebagai benteng nilai tukar sekaligus jangkar kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter ini akan jauh lebih efektif menstabilkan pasar jika diimbangi dengan disiplin fiskal

yang ketat serta transparansi tata kelola anggaran dari pemerintah.

Transmisi Suku Bunga dan Tantangan Likuiditas Perbankan

Bagi industri perbankan nasional, kebijakan suku bunga tinggi ini secara langsung menekan margin dari sisi biaya dana (*cost of fund*). Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), **Hery Gunardi**, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), mengemukakan bahwa pengetatan ini memberikan tantangan yang nyata bagi pengelolaan likuiditas perbankan di tanah air.

“Bank-bank kini harus bersaing ketat memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan menawarkan suku bunga simpanan yang lebih kompetitif demi mencegah perpindahan dana nasabah ke instrumen investasi berimbal hasil tinggi lainnya,” kata Hery kepada media beberapa waktu lalu.

Kondisi likuiditas semakin diperketat oleh penarikan bertahap saldo anggaran lebih (SAL) milik pemerintah dari perbankan nasional mulai Juni 2026. Penarikan ini mengakhiri masa penempatan dana SAL sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang sempat dilakukan pada September 2025.

Wakil Ketua Umum PERBANAS yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), **Nixon LP Napitupulu**, mengungkapkan bahwa penarikan gradual dana SAL memaksa perseroan menyesuaikan rencana bisnis bank (RBB).

“Untuk menjaga likuiditas, perbankan terpaksa mencari alternatif pendanaan non-ritel yang cenderung memiliki biaya lebih mahal,” ujar Nixon.

Sebagai konsekuensi dari pembengkakan biaya dana tersebut, industri perbankan

diperkirakan akan mulai menaikkan suku bunga kredit baru secara selektif dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, khususnya pada segmen kredit modal kerja. Langkah ini penting dilakukan guna mempertahankan *Net Interest Margin* (NIM) industri agar tetap berada di batas aman untuk mendukung pertumbuhan permodalan perbankan.

Dampak Terhadap Sektor Riil dan Kelas Menengah

Kenaikan biaya modal di industri perbankan ini pada akhirnya akan merembes ke sektor riil. Suku bunga kredit baru secara industri tercatat merangkak naik dari rata-rata 8,95% menjadi 9,31%. Bagi masyarakat kelas menengah, kenaikan ini langsung berdampak pada peningkatan beban cicilan bulanan, terutama bagi nasabah KPR lama yang telah memasuki masa suku bunga mengambang (*floating rate*). Berdasarkan Survei Konsumen BI per Mei 2026, proporsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk membayar cicilan utang telah naik dari 9,7% menjadi 10,2%. Tekanan terhadap daya beli ini berpotensi menahan ekspansi konsumsi rumah tangga secara nasional.

Apabila suku bunga acuan terus bertahan tinggi mendekati level 6,0%, dampaknya akan semakin terasa pada dunia usaha. Biaya modal yang tinggi bagi korporasi

dan keterbatasan akses kredit bagi UMKM dapat menghambat pertumbuhan ekspansi usaha. Di tengah melambatnya permintaan domestik, dunia usaha dikhawatirkan harus mengambil opsi efisiensi biaya operasional yang ketat demi menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Menjaga Keseimbangan di Tengah Gelombang

Menghadapi era suku bunga tinggi ini, perbankan harus menerapkan strategi manajemen risiko yang adaptif dan proaktif. Upaya memitigasi tekanan biaya dana dapat dilakukan melalui optimalisasi dana murah (CASA) serta perluasan ekosistem digital untuk menjaring nasabah ritel secara efisien. Di sisi lain, pelaksanaan stress testing secara berkala terhadap kualitas portofolio kredit sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit bermasalah sejak dini.

Dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang responsif, komitmen disiplin fiskal dari pemerintah, serta penerapan manajemen risiko yang disiplin oleh perbankan nasional, industri keuangan diyakini mampu mempertahankan stabilitasnya dan tetap kokoh menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Tabel Data Historis Suku Bunga (2021 - 2026)

Periode	BI Rate / BI-7DRR	Bunga Deposito 1 Bulan (Rata-rata Industri)	Suku Bunga Kredit Modal Kerja (KMK)	Keterangan Konteks Ekonomi
Juni 2021	3.50%	2.90%	9.25%	Era likuiditas melimpah pasca-pandemi
Juni 2022	3.50%	2.75%	8.50%	Transmisi pelonggaran moneter penuh
Juni 2024	6.00%	5.10%	9.45%	Puncak siklus pengetatan moneter global
Juni 2025	4.75%	4.15%	9.10%	Relaksasi moneter seiring penurunan Fed Rate
Juni 2026	5.75%	4.85%	10.15%	Kenaikan agresif merespon tekanan nilai tukar

Kartini Perbankan 2026



Di tengah percepatan inovasi perbankan digital, beliau hadir memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor yang tepat.

Melalui perannya, beliau tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dan solusi agar inovasi tetap berjalan dengan aman dan bertanggung jawab.

Kartini masa kini adalah mereka yang menjaga keseimbangan, antara keberanian untuk maju dan kebijaksanaan dalam melangkah.

Alya Rahmayani
Legal Corporate Lead, PT Bank Neo Commerce Tbk

Bagi beliau, pengetahuan adalah akses untuk masa depan.

Melalui edukasi keuangan yang inklusif, beliau membuka kesempatan bagi banyak orang untuk memahami dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

Kartini masa kini adalah mereka yang membuka akses, dan menyalakan harapan melalui pengetahuan.

Andhina Aryani
Sustainability Program Activation Specialist,
Bank Jago





Bagi beliau, akses keuangan adalah jalan untuk memberdayakan.

Melalui strategi dan edukasi, beliau menjembatani kebutuhan di lapangan, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Kartini masa kini adalah mereka yang membawa perubahan, dan membuka jalan bagi banyak orang.

Francisca Esa Rizky Amalia
Senior Manager, BRI

Bagi beliau, literasi keuangan bukan sekadar pekerjaan—tetapi bagian dari keseharian.

Dari karyawan, mahasiswa, hingga komunitas, beliau hadir dengan pendekatan yang sederhana dan penuh empati.

Kartini masa kini adalah mereka yang hadir untuk memberdayakan, dengan cara yang paling dekat dengan kehidupan.

Ade Yani
Region Service Quality Manager, CIMB Niaga



Sejak lulus kuliah, beliau telah menapaki perjalanan sebagai seorang bankir, tumbuh bersama dinamika dan tantangan di industri perbankan.

Beliau mengelola layanan, membangun kepercayaan nasabah, serta memastikan kinerja tim tetap berjalan optimal.

Kartini masa kini adalah mereka yang setia pada proses, dan terus melangkah dengan keteguhan di setiap peran yang dijalani.

Nerly Sugianto
Pemimpin KCU, Bank Victoria International



Beliau membawa edukasi keuangan langsung ke karyawan nasabah—bahkan hingga ke keluarga mereka.

Dari langkah sederhana, lahir perubahan nyata: kebiasaan menabung tumbuh, pengelolaan keuangan menjadi lebih bijak.

Kartini masa kini adalah mereka yang menghadirkan perubahan, melalui langkah yang konsisten.

Karinda Rachmana
Head of Corporate Banking Japanese, SMBC Indonesia



Di balik sistem yang akuntabel, ada peran yang dijalankan dengan ketelitian. Beliau memastikan setiap proses berjalan dengan tanggung jawab, dan membantu membangun kepercayaan dalam organisasi.

Kartini masa kini adalah mereka yang menjaga kepercayaan, melalui peran yang sering tak terlihat.

Serra Genia
IT Internal Audit Head, Hibank



Melalui edukasi dan pendampingan keuangan, beliau membantu masyarakat memahami bahwa perencanaan keuangan bukan hanya tentang investasi, tetapi juga perlindungan.

Beliau hadir langsung melalui seminar, investor gathering, hingga diskusi bersama nasabah dan rekan kerja, dengan pendekatan yang sederhana dan relatable.

Kartini masa kini adalah mereka yang tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga memberi teladan melalui langkah yang dijalani.

Pingkan Lies Permatasari
Kepala Bagian Wealth Management, Bank Ganesha



Perannya mungkin tidak selalu terlihat, namun menjadi fondasi kepercayaan.

Beliau menjaga integritas dan memastikan sistem berjalan dengan aman dan transparan.

Kartini masa kini adalah mereka yang menjaga nilai, dengan keteguhan yang konsisten.

Tutwuri Anggarwani K
Compliance & AML Division Head, KB Bank



Saatnya Berkurban. Saatnya Peduli.

Jakarta, 28 Mei 2026

KMPP kembali menyerahkan hewan kurban untuk warga sekitar PERBANAS Institute.



Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi

Lindungi Data dengan Bijak dan Aman

5 Juni 2026, PERBANAS Balikpapan menggelar Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi dengan topik “Lindungi Data dengan Bijak dan Aman” bertempat di Ibukota Nusantara. Peserta sosialisasi adalah karyawan Otorita IKN dan para pimpinan cabang bank Balikpapan dan Samarinda lebih kurang 300 orang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia, perwakilan OJK, dan Direktur Eksekutif PERBANAS.



PERBANAS bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

Penanaman 1.153 bibit pohon

IKN, 5 Juni 2026. PERBANAS bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), BI IKN, OJK Kaltim-Kalut dan insan perbankan turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman 1.153 bibit pohon di kawasan Embung H Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung visi Nusantara sebagai Forest City yang mengedepankan harmonisasi antara pembangunan dan pelestarian alam.

Bibit yang ditanam terdiri atas berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekologis dan konservasi tinggi, antara lain angsa, balangeran, bungur, jambu air, Jambu biji, kapuk, kapur, kemiri, ketapang laut, mangga, meranti, rambutan, sukun, dan trembesi. Menurut Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono, kegiatan menanam pohon ini telah menjadi budaya yang terus dijaga oleh IKN. Dalam kesempatan tersebut hadir mewakili PERBANAS, adalah Direktur Eksekutif dan Pengurus PERBANAS Balikpapan.





**PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(BANK JATENG)**

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009 dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada tahap I Tahun 2026 sebagai berikut :

**TAHUN 2026 (KONVENSIONAL) : Rp. 332.952.138.388,-
UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2026 : 6.503.513.991,-**

Rincian Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang bersamaan dengan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2026.

Informasi Penting Kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kepada Debitur yang terkait di **Bank Jateng** agar masing-masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. **Bank Jateng** senantiasa memenuhi Undang - Undang Perpajakan dan Undang –Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank Jateng** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank Jateng** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank Jateng** di tahun 2026. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;
4. **Bank Jateng** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;
5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank Jateng**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang Nyata – Nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi Bank Jateng, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)



TAHUN 2024 - KONVENSIONAL

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
1	AMINUDDIN AZIZ	5.225.703.980	101	IMELDA SUSANTI HARTONO	637.136.615	201	SUDIHERTI	392.774.365	301	TANTIN WAHYUNINGSIH	305.351.730
2	SANDRA ARIS GIRI PAMUJI	4.655.416.164	102	SUGENG PRIYANTO	637.088.809	202	NINIK KUSNAENI	391.020.443	302	YUSNITASARI	304.981.493
3	PUTRA PELITA JAYA	3.476.376.661	103	RAVIAN BIMO WICAKSONO	635.479.098	203	MARDA NURAIDA	390.421.709	303	SRI YUNIATI	304.967.063
4	AHMAD RIFI	3.412.384.265	104	NAILIL KHUSNA	629.992.847	204	PUNGKY APRIANA	389.710.833	304	WASIRAN	303.381.732
5	SRI MURBIYANTI	2.911.393.834	105	AGUS HASAN BASAROH	617.734.157	205	ENDAH SETYAWATI	388.965.790	305	YULI CAHYATI	303.114.555
6	MUHAMMAD FARUQ	2.879.188.974	106	ADE SUHARTANTO	617.428.647	206	INDRA ADI SAPUTRA	388.306.181	306	BUDIANTORO	302.688.871
7	BUDI SUTYONO	2.743.986.154	107	ALI MUSTOFA JOKO NUGROHO	610.632.968	207	M ALFAN FAZA	388.122.174	307	DARSONO	301.400.680
8	SANDRA ARIS GIRI PAMUJI	2.595.339.326	108	SUPARMAN	608.963.231	208	DWI ATMOKO WICAKSONO	386.647.050	308	DEWI SETYAWATI	301.064.559
9	NANIK UMI ROCHANA	2.582.365.717	109	ANDRIAS KARTIKOSARI	597.652.939	209	MURTINAH	383.959.763	309	NANDHO WAKHID FADLILAH	300.204.908
10	IVAN REGAN KRJANTO	2.571.048.419	110	KOKAPTRAYA	590.477.841	210	HADI SUPARMAN	383.804.545	310	DWIKO ARIF KURNIAWAN	300.000.000
11	SOETARDOJO	2.536.067.923	111	M ANDRI SAPUTRO	581.716.426	211	BANGKIT RIYAN PERMANA	382.884.074	311	KRISGIANTORO	299.968.742
12	HELMY SRI FATMAWATI	2.533.297.900	112	ANDREAS TJAHJONO	563.899.399	212	WARSONO	382.699.214	312	DARSINAH	299.464.288
13	ARNOLU NUGRATAMA	2.304.334.970	113	SOIMAH	568.210.283	213	BANDI SETYAWAN	380.490.339	313	KPRI JUJUR	299.263.234
14	TRUBUS JAYA FARM	2.287.254.805	114	TUKIMAN	554.196.611	214	HANNA PERMANASARI	378.125.268	314	DEWI RAHAYUNINGSIH	298.039.917
15	PIFIK MOCHTAR SAPTONO PUTRO	2.208.105.091	115	MOCH ZAINI	552.447.354	215	KUSATI	375.275.428	315	DIAN FITRIANA	298.799.575
16	MUHAMMAD FARUQ	2.192.053.440	116	VITA DAMAYANTI	549.642.113	216	SOEDARMADI	371.692.607	316	KURLINA FEVI CHANDRA	298.304.406
17	SRI MURBIYANTI	2.161.371.064	117	KPRI NEU RSUD BMS	548.135.592	217	MUSLIMIN	371.297.766	317	ACHMAD SODERI	298.040.376
18	TRI YOGO HANDAR BENI	2.065.081.981	118	SUSILO JATMIKO	547.781.435	218	IDA JOHAR	369.278.468	318	FATKHURROHAJI	297.283.432
19	ADI JAYA FIRDAMA	2.033.447.272	119	KUSNOMO	545.924.107	219	ALMA ANDINI	367.639.620	319	FATAHUDDIN	300.628.318
20	FUROON	2.013.613.702	120	LULIN WISNU PRAJOKO	541.760.006	220	SITI ARIF WAHYUNI	366.165.526	320	DWI MARYONO	296.704.908
21	SULASTRI	1.814.927.399	121	YUNIARTI SOETILJO	541.697.258	221	AHMAT MUSTAIN	365.622.013	321	NGATMIYATI	296.465.924
22	BACHTIAR RIVAI	1.774.375.267	122	DODIK RACHMAT BINTORO	537.477.846	222	TASIROH	363.016.035	322	BAMBANG KHOLIS	296.335.973
23	JOKO KISWORO	1.744.145.813	123	KPRI NEU RSUD BMS	533.999.983	223	ENCEP SUPRIATNA	362.037.428	323	RUKUN CATUR SUSANTO	296.095.834
24	BANDI SETYAWAN	1.725.742.294	124	SULIS ROMLINARNI	533.985.855	224	TJAHJONO BDI WALLUJO	360.477.577	324	EDI MULYONO	314.236.230
25	SUHARNI	1.693.296.839	125	KOTOT GUTOMO	538.763.899	225	CARYOKO	360.133.765	325	TARMIN	294.333.180
26	NUR BINTANG SEMBILAN	1.671.407.014	126	YUSUF BUDIMAN	530.861.263	226	BRAMASTA SINULINGGA	360.098.699	326	SISWANTO	293.873.406
27	BANDI SETYAWAN	1.636.751.500	127	SUKINO	530.018.548	227	MUHAMMAD ADI NUGROHO	358.007.990	327	ARIES WIDIYOKO	293.870.176
28	YUYUN TITIK ERAWATI	1.624.105.979	128	SARI UTAMI	521.167.211	228	CATUR YULIAWAN	354.291.854	328	BAMBANG SUHARTONO	293.169.676
29	KUSNOMO	1.517.737.735	129	AGUNG RIYANTO	519.501.040	229	SEPTI ARUMININGSIH	355.217.384	329	ENDANG BUDI LISTIYATI	292.951.498
30	KHOLILUR ROHMAN	1.530.000.000	130	SURIP	516.651.077	230	AJENG FITRIANI	351.433.447	330	FRISKA SUKMANINGTYAS	292.946.210
31	HETI PURWANI	1.479.123.810	131	SAEFUL AZAM	512.417.881	231	RICH RIZOI IZHARH BASSNENDAR	351.202.726	331	HENING PUJIHASTUTI	292.057.199
32	ALDILA NUR AFANDI	1.416.948.535	132	FAJAR ARIYANTO	504.923.278	232	ASMARA WATI	349.743.769	332	YULI HARYATI	291.960.620
33	ROWAN TIRONI	1.409.089.015	133	KHUZAEMAH	504.296.719	233	SAERONI	349.726.532	333	ENDANG TRI SETYANINGSIH	291.809.180
34	ROWAN TIRONI	1.306.835.156	134	TURAHADI	503.692.337	234	MUHLIS PRIHANDOGO	349.606.717	334	ARI MARTYONO INDARTO	291.868.142
35	MOCHAMMAD ALI UDDIN	1.300.000.000	135	AHMAD SHODIQIN	501.768.593	235	TITIN EROWATI	350.672.484	335	PRIVANTO	291.822.325
36	DESI IRNAWATI SUSANTO	1.237.434.953	136	SUGINO	501.614.974	236	MUJIB MUFTI	349.477.999	336	DARMINTO	291.551.121
37	SRI WAHYU RATRI	1.225.481.506	137	DWI REJOWATI RATNANINGSIH	500.610.625	237	SUTRIMAN	347.512.246	337	TONI SUHADA	291.281.828
38	DWI RATNA INDIYANI	1.207.527.228	138	SUPRIYONO	500.000.000	238	SURAJI	347.177.157	338	KPRI NEU RSUD BMS	290.741.601
39	KPRI NEU RSUD BMS	1.183.479.885	139	KPRI NEU RSUD BMS	499.257.834	239	YOHANA DIAN PRATIWI	346.388.882	339	SUPRIYANTO	290.358.526
40	YUSUF ZAENAL ARIFIN	1.182.949.886	140	SUNARNO	489.529.272	240	IBNU PRIYANTONI	346.091.283	340	IMAM NAWAWI	289.993.836
41	NAJMUDDIN HASAN ALFAUZY	1.158.144.853	141	ARIF ARIYOWATI	481.441.064	241	MISTYAH	345.635.759	341	SRI NURYATI	289.696.343
42	DHARIS MARCHUS SUSANTO	1.133.939.532	142	NITA SHOLIHAH	480.623.497	242	AGUSTIANI	345.463.947	342	SUHARTANTI	289.514.296
43	KJKS BMT ARTA JIWA MANDIRI	1.099.632.137	143	DIAN ACHMAD GHURON	478.585.880	243	RATIMAN EDI SUWIRYO	345.415.211	343	TARJONO	289.046.633
44	SARDI SUSANTO	1.085.607.485	144	SUSILO JATMIKO	477.070.820	244	EDI MASIRAN	345.000.000	344	KHARISMA DIAH EKA RETNO	288.869.430
45	ALDILA NUR AFANDI	1.049.635.220	145	SEPTA DEWI PUSPTASARI	475.936.409	245	SURATNO	343.981.538	345	SARTINI	288.761.128
46	SALIMIN HADI SUTARTO	1.045.392.729	146	DARSINI	475.513.616	246	SITI CHABIBAH	342.056.129	346	SUPRIYANTO	288.837.250
47	WIBAWA HANDAKA	1.030.593.489	147	SETIYONO	475.115.820	247	SRI KARYATI	341.675.500	347	SUKARTINI	288.322.102
48	DESI IRNAWATI SUSANTO	1.020.617.713	148	BUDI LASONO	472.803.737	248	CHOLIDIN	341.199.471	348	AGUS FITA YUDYANTO	287.553.043
49	TRI SUSILO ASTUTI	1.008.866.095	149	MUHAMMAD NUR IKSAN	462.640.875	249	NASTANGIN	340.061.709	349	IRAWAN PALUPININGTYAS	287.157.498
50	AGUS SANTOSO	1.005.316.587	150	RAHMAT WIDAYAT	461.627.178	250	SULIS SETIOWATI	338.789.511	350	ATTI WONDA HARANI	287.109.670
51	MASNUR	1.000.000.000	151	BANDI SETYAWAN	460.923.717	251	FEBRIYANTO	337.356.718	351	SURYANTO	287.863.209
52	INDO KARYA TAMA CV	1.000.000.000	152	HAVIT NUGROHO	455.803.873	252	WITANTO	337.321.858	352	NIKMATUL HUDDA ELLAIY	286.173.013
53	BAMBANG PUJDIANTO	1.000.000.000	153	SARWAN	455.553.183	253	EDI KRISTANTO	336.916.477	353	HARTANTO	291.516.535
54	ERY WIDJAYATMO	968.690.306	154	SOFHIA ZAHRA PARASTUTI	454.635.153	254	PUGUH RAHARJO	334.803.160	354	DARYONO	285.923.788
55	SUPARTONO	967.737.792	155	TRIJONO	453.739.420	255	ANANG IBNU MARWAN	334.877.185	355	WINARSIH	285.341.008
56	SULISTIYANTO	962.874.161	156	ZIDNI	453.603.686	256	AGUS SUPRIYANTO	333.526.765	356	SUMIATI	284.742.174
57	WIDYA KANDI SUSANTI	958.484.703	157	GINANJAR UKTI NUGROHO	452.635.963	257	YULINDA PRATKANINGRUM	333.502.160	357	TITIK HIDAYATI	284.579.600
58	IBNU PRIYANTONI	949.300.001	158	MICHAEL RENARA SYIFA	452.022.698	258	SUKO TRYONO	332.750.585	358	BUDI NUGROHO	284.499.140
59	RAHARJO	935.508.540	159	WIWIT SATRIONO	451.695.537	259	SIH WARNI	332.361.940	359	TRI YULIATI	283.729.186
60	DOMINICA RITA YUWANAWATI	930.317.769	160	TRI SULISTYANINGSIH	449.718.989	260	SAMINO	330.566.240	360	NILA YUWANTI PARAMITA SARI	283.716.619
61	HENDIKA PUTRA MANDIRI CV	899.000.000	161	SUGIANTO	447.856.093	261	NANANG JATMIKO	330.106.335	361	HERI PURWANTO	282.877.680
62	ALAN BUDI INDRAMAN	895.207.180	162	SUWARNO	447.833.187	262	FITRI NOVALIA	329.793.847	362	MOH JASMEDI	282.851.910
63	SUGIANTO	891.781.327	163	MUJIYATUN	444.500.593	263	DEWI ANGGI ARIASTUTI	330.554.875	363	NATALIA DIAN KRISTINA	282.031.796
64	AHMADI	892.861.581	164	MUHAMMAD FAJAR NUGROHO	442.652.673	264	KUZAINI	329.290.064	364	SUDJONO	284.540.624
65	WAHYU KUNCORO WICAKSONO	880.011.645	165	JOKO NUGROHO	442.076.034	265	LILIS SETYOWATI	328.971.128	365	JONI KRISTANTO	281.388.044
66	FARIDAH	861.769.451	166	TITI HARMIYATI	448.942.513	266	SUKANI	328.587.696	366	RIA KUN PRATIWI	281.245.057
67	MUHAMMAD FARUQ	859.965.124	167	YUYUN YUNIATI	438.472.625	267	SUTIKNO	327.357.746	367	ARIF MUHAMMADUN	281.261.990
68	AGASTYA AJI PRANAYOGA	856.635.777	168	ACHMAD MUSTOFA	438.177.764	268	BAGUS CONDRIO WIBOWO	326.599.897	368	AHMAD IKHSANUDIN	282.720.422
69	SUPARTI	848.990.468	169	ROZIKIN	437.219.702	269	SUJITO	326.277.861	369	SITI MUSRIFAH	280.560.718
70	KARTINI	819.364.868	170	ALIF SAFANGAT	437.213.237	270	SUMARNO	324.929.716	370	ARIF ISNANTO	281.932.650
71	NAJMUDDIN HASAN ALFAUZY	811.029.229	171	SUPARNO	434.574.887	271	MUJI RAHARJO	324.778.733	371	SAMINGAN	280.489.710
72	NILAM WINDU TYASJATI	805.611.552	172	SRI KARTINI	432.430.176	272	HARTONO	324.326.215	372	TRI KHAMBALI	280.162.613
73	APITA FIKRI INDRASUARI	801.772.860	173	NURJANAH HUSNUL KHOTIMAH	435.569.246	273	ALMAIDAH	322.616.244	373	TAUFIKUR ROHMAN	284.768.532
74	YOANNES KURNIA SANDY	799.459.205	174	DANI WARDJOYO	427.573.360	274	DJOKO RADA PRASETYO	322.294.215	374	SOBIRIN	278.102.543
75	JUNAERTI	773.371.121	175	AHMAD RIFAI	424.802.839	275	PURWANTI	319.986.781	375	HERI ISMIYADI	277.795.679
76	RAVIAN BIMO WICAKSONO	770.829.175	176	ROZIKHUN	421.270.257	276	SUTARNI	319.208.142	376	BUDIYONO	277.779.169
77	KSP JAYA EKA SAKTI	761.735.422	177	SUKIRMAN	419.338.723	277	TJPTONO	317.951.178	377	MISONAH	276.938.130
78	KPRI NEU RSUD BMS	754.945.872	178	WACHYAT RIYADIANTO	416.449.619	278	MUSTAGHFIR RIDHO ILYAS	321.587.360	378	WARSONO	276.793.793
79	RUDJITO	750.023.597	179	ENTI UTAMI	416.172.800	279	YUSTINA DIAN NOVITA	317.299.321	379	KPRI NEU RSUD BMS	276.151.976
80	NUGROHO CV	750.000.000	180	ERNI WIDIASTUTI	414.957.611	280	SRI HARNINGSIH	316.777.592	380	ARIF MUHAMMADUN	276.639.258
81	JOSI TANA NUR OKTAVIA	744.673.351	181	KOKAPTRAYA	414.717.688	281	SIGIT BUDHI MUHANTO	316.115.041	381	YUDI KOTARI	275.092.871
82	EDIE SUSANTO	741.468.574	182	YULIANTO	413.446.705	282	SRI MULYATI	315.957.098	382	DYAH WINARNI	274.733.390
83	MIRA BERLIANI	727.775.305	183	WAGIYONO	410.856.400	283	YOHANES ADI PRIYANTO	315.935.323	383	DARYADI	274.567.482
84	SAFUANNUDIN	725.227.882	184	YUSUP NUR CAHYANTO	410.547.025	284	WARSI	314.850.725	384	KASRIPIN	275.994.861

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)



TAHUN 2024 - KONVENSIONAL

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
401	ERFAN ZUBAIDI	266.728.882	501	SUNDARI ERNAWATI	226.543.513	601	SHOFWATULAINI	164.660.856	701	BUDIANTO	114.740.191
402	MUSAFAK	265.573.016	502	EKO SUKISWANTO	228.220.744	602	MUHTADI	162.203.454	702	TEGUH ARIANTO	114.362.872
403	WAHYU TRIWIBOWO	264.957.482	503	M ADITYA ARIF NOOR SYAHBANA	225.637.380	603	KARSITI	162.162.842	703	SARINAH	114.331.435
404	NGADIYO	264.622.540	504	SYURYA SAKTI SYAMSUDDIN	226.103.587	604	MUKHLISIN	161.338.846	704	MUHAMAD SYARIFUDIN	114.216.074
405	MARIA GORETTI SUTARNI	264.356.907	505	SUTARNO	223.734.115	605	AHMADI	161.282.695	705	YUMIATI	113.781.802
406	RISMANTO	264.021.995	506	WAGIMAN	223.455.948	606	ARI NUGROHO	160.755.364	706	NURYATI	113.523.786
407	ABDUL ROKHIM	264.010.934	507	MARYANI	223.279.462	607	KARTINAH	159.009.964	707	ENY MEGAWATI	113.553.773
408	DARHELI	263.905.308	508	NUR HIDAYAH	225.188.431	608	IKELIN MARETO	159.521.870	708	EKO SUPRIONO	113.520.053
409	ENIS SETYOWATI	262.926.543	509	AYU OKINA SAVITRI	222.476.541	609	ARIYANI	156.953.470	709	EDI SETIAWAN	112.552.627
410	ZAENUDIN	290.437.482	510	SUROS	222.155.315	610	WINARTI	159.235.139	710	WARIDAH	112.548.294
411	NOOR SALIM	260.276.536	511	TUMINGAN	222.394.096	611	SITI IMROATUN	156.673.008	711	BUDIYONO	112.635.405
412	AGUNG DWI PAMUJI	259.784.615	512	SUYONO	216.557.637	612	KPRI HANDAYANI	156.611.174	712	VERA DAMAYANTI	112.138.142
413	SITI UMAYAH	258.648.800	513	ASYHARI	215.626.496	613	BAYU KRISTianto	157.439.745	713	RAHAYU SLAMET	111.736.729
414	KATMIN	258.398.836	514	SUTIYEM	214.947.375	614	SITI SOLECHAH	155.775.529	714	ERWAN SUKADI	111.707.459
415	YAYAT RUHYAT	257.833.292	515	MURTIANI	214.782.161	615	SUKAMTO	156.024.477	715	TOHARI	111.668.186
416	MISBAKHUL MUNIR	257.524.190	516	SITI UMI KULSUM	214.633.140	616	SOBIRIN	154.999.380	716	TRI JOKO LELONO	111.211.623
417	SONY KUSDIYANTORO	257.201.516	517	BASUKI RACHMAT	214.469.680	617	SLAMET PURWOKO	152.000.217	717	AHMAD NUR KHODIN	110.855.621
418	EDY WURYANTO	256.134.090	518	EKO PRAYITNO	214.435.049	618	GUNAWAN	151.681.395	718	ALAN SUPRARLAN	110.511.663
419	SUGIYANTO	254.982.020	519	FAYSHOL ANWAR	214.144.825	619	ACHMAD USADANI	150.649.681	719	DARINEM	110.256.262
420	MUTHIYA WARDANI	254.930.250	520	ARIF SETIYAJI	452.108.148	620	SUGIARTI	150.573.692	720	AGUS SUSILO	109.900.068
421	NASORI SUCHIN	254.382.893	521	SUNARTO	214.041.547	621	SURATNO	149.522.550	721	NIKMAH	109.302.616
422	RUSWANI	254.269.380	522	HANUNG YUWONO	209.461.624	622	SUPRIYO	150.210.276	722	VELLANIA MAI ANJANI	108.928.761
423	JONI ARI SAGITA	253.720.744	523	EKO PRIYANTO	210.780.065	623	DARKUNI	149.200.909	723	RISWATI	108.641.409
424	RUSLANI	253.580.499	524	MULYATI	206.932.736	624	RESTU MUHAMMAD HISYAM	147.702.335	724	IDA PAELA SHOFFA	108.165.138
425	DYAH WINARNI	254.301.989	525	YOHANA TRI SUSILOWATI	206.419.986	625	SUTIYO WINARSONI	147.656.965	725	NUGRAHENI WAHYU OETAMI	106.937.431
426	SUTODI	252.707.803	526	ANDREAS WIYANTO	205.936.792	626	YOHANES ANDIA KHRISNA	147.533.498	726	WIWIN ERMAWATI	106.895.007
427	DADIYO YULIANTO	253.321.326	527	EVA FITRIA WAHYUJATI	205.889.550	627	FADLUDDIN MUFID	147.471.687	727	INTARTI	106.744.602
428	RUHIN M	251.970.215	528	NURUL HIKMAHWATI	205.767.018	628	SUKIYAT	147.099.647	728	NUR CHOLIK	107.069.348
429	SUNARYO NARNO WIYONO	251.936.823	529	DWI PURNOMO	204.833.220	629	HARYONO	146.874.385	729	WINARNO	105.660.638
430	TARMIN	251.623.965	530	IGE SUHEMI CITRO WIYONO	204.106.006	630	AGNES AGUSTINA	146.795.556	730	NURUL TAUFIK HUROH SAPUTRA	105.464.904
431	SUMIATUN	251.333.763	531	ANI PUJI ASTUTI	204.075.527	631	SUNARNI	146.256.369	731	SEPTIANI	105.045.923
432	MOH SUDONO	250.979.580	532	TIN CAHYANINGRUM	204.061.294	632	SUYONO	146.140.111	732	DODIK LUQMAN SAHID	104.555.804
433	RIYONO	250.688.300	533	MASHURI	205.827.130	633	INDAH SULISTJO NINGRUM	145.855.206	733	RETNO HASTUTI	104.419.704
434	HERI SETIONO	250.546.971	534	SUKARYONO	203.748.282	634	SITI ANIFAIYUN	145.634.542	734	SOFIYAN	104.235.294
435	DJOKO WINTORO	250.534.728	535	MIRA BERLIANI	203.218.991	635	ISTIANAH	144.692.138	735	EKO YHULIANTO	104.183.900
436	HENDRO SETYO BUDI EKO SAPUTRO	250.390.378	536	NUR KHOLIS	203.073.307	636	ROCHATI	144.144.500	736	MUHRIDI	120.046.824
437	SUGIARTO	249.857.408	537	LEONITA CAHYANINGTYAS	203.590.530	637	KOKAPTRAYA	194.633.001	737	ISLAHUL FAUZHIAH	103.307.772
438	JUWARI	249.167.931	538	PARDIJO	201.527.370	638	SALMINI	141.332.709	738	TOZIAH	103.294.104
439	MUJIYO	249.211.650	539	SUNARYO	201.584.115	639	KOMARIYAH	141.133.418	739	ANIK MAHAWATI	103.399.292
440	LULUK YULIANA	248.989.847	540	ZUMROFIATUN	201.386.283	640	YUNI RISKIANINGSIH	141.122.515	740	BUDI SUSILO	102.924.607
441	AGUS SUJATMIKO	248.638.308	541	SRI WATORO NURUJATI	201.295.165	641	RESTU ABIRANDA BIMARONI	140.210.855	741	DONI SURYAWAN	102.694.350
442	RONY KRISTIAWAN	248.445.083	542	RUSTAMI	198.834.107	642	NANTO NUGROHO	140.006.448	742	JONO	102.690.923
443	SUPATMI	247.648.470	543	ERFANDI	198.824.825	643	SUKESI	139.693.383	743	AMIN HAMDAN	102.171.317
444	ENDANG RENCOKOWATI	246.876.725	544	DIAH ROMANASARI	197.535.033	644	YUNITHA PUTRI SETYANINGSIH	138.598.760	744	AZKA MAFAZA NUR IKSANI	101.445.862
445	HERI ISTIANTO	246.726.380	545	DANANG ARIES SETIAWAN	197.417.270	645	ESTI WIDIANINGSIH	137.635.907	745	ARIEF RIVYANTO	101.008.991
446	DATO SUKMA WANGSITINGTYAS	247.527.180	546	SUGIYONO	196.699.639	646	DURUTUL JANAH	136.649.116	746	RULY TRI CAHYO RAMADHAN	101.074.102
447	SUGIARTO	245.058.013	547	NURUL AMINAH	194.801.411	647	NURKHOLIS	136.859.949	747	SUMIYEM	100.871.883
448	NUR KHAKIMAH	244.805.392	548	NURYANTO	194.679.262	648	MUHAMMAD SAID	136.108.309	748	MANSYUR	100.783.376
449	UMAR BUDI RISTANTO NUGROHO	244.073.828	549	LUCIA HERAWATI	196.434.999	649	WINARSIH	135.487.329	749	DIDIK KURNIADI	99.832.363
450	NITO AGUNG LAKSANA	243.574.909	550	YULI LISTIONO	193.685.901	650	TUMBRAS	135.133.696	750	HENDRO PRAYITNO	99.372.152
451	PADI	243.403.820	551	SUGIYANTO	193.199.534	651	SITI ROWIYATUN	134.804.372	751	SODAKOH	99.204.592
452	WINDIYA PURWANTI	242.551.540	552	DAVIN ERLAND VENUS LESMANA	207.332.683	652	YASKUR	134.803.560	752	SLAMET WIDODO	99.094.784
453	SARJOKO	241.112.354	553	SUYATNO	191.666.280	653	EKO WINARNO	133.777.071	753	FEBRI KRISTANTO	99.090.320
454	JUMALI	240.399.115	554	SARNO	191.016.617	654	HARYANI	135.412.911	754	SARI AYATI	103.764.013
455	ALMA ANDINI	240.339.655	555	SUHLIL	190.059.714	655	NURHIDAYAT	133.515.453	755	WIDAWATI	97.462.289
456	BAYU EKO INDIYONO PUTRO	240.262.890	556	ASMAHWATI	189.576.502	656	TRI NOVITARINI	133.013.959	756	MUSTOFIAH	97.400.819
457	SRI WINARSIH	240.192.070	557	MUHAMMAD YUSUF KUSNANTO	232.902.942	657	HILAL FATKHUS SYURUR	133.348.318	757	JANI PERMATASARI	96.489.307
458	AINY SETIAWATI	240.119.361	558	ARYANI	188.531.102	658	SRI KUSMIYATI	132.720.298	758	DIAN PURNANASARI	96.219.558
459	YOANNES KURNIA SANDY	239.720.370	559	NENNY YUNIVERA	188.190.559	659	ANDI PURNAMA	131.955.741	759	LISA HARTONO	96.111.739
460	TRI PURANTO	239.662.140	560	TEGUH WIDODO	185.321.493	660	DWI WINARNO	133.001.249	760	LINDI WENDI YANTI	95.825.555
461	SUMARDAWA	239.590.380	561	DANANG BAYU NUGROHO	184.665.513	661	DARMI	131.149.784	761	MURSID KARTIYUWONO	95.814.012
462	DARYOTO	239.543.316	562	SIGIT SARWONO	184.649.760	662	GUNAWAN PERMADI	130.898.540	762	DAVID KUSWORO	96.643.236
463	TRI SUTRISNO	239.103.974	563	PUNGKASA YULIANTO	184.623.017	663	POPPY ARUNISA	130.113.064	763	PASRI	95.599.923
464	RINA SUSWANTI	234.092.494	564	CARSINAH	184.136.842	664	WAHONO	130.050.888	764	YUSNITA HERY SUKIRNAWATI	95.195.277
465	DESSY WITDYOKO	238.927.248	565	SRI RATNA RAHAYUNING	183.748.860	665	ASHI HANDAYANI	130.872.154	765	NARNI	94.955.210
466	SIGIT NURHUSEN	238.916.498	566	MOHAMMAD MUJIB	183.156.760	666	YOTO ALAMSHAY	131.159.650	766	SUTRISNO IRAWAN	94.922.207
467	MUHTADIN	238.014.754	567	AMINAH	181.885.228	667	TULUS BUDI MARGONO	129.096.610	767	MARDIYANTO	94.385.059
468	Y. DWI ATMOJO ADINUGROHO	237.754.099	568	SUHAENAH	181.527.492	668	DWIYANTO	128.155.854	768	ABDUL GHOFUR	94.197.046
469	TATI SUGIARTI	237.688.780	569	SUPRAYITNO	181.299.142	669	DEWI NUR INNAYAH	127.691.320	769	ASMAUL KHUSNA	94.128.498
470	ANJAR SETYA TAMTAMA	237.592.522	570	TAUFAN ADI NUGROHO	180.000.000	670	AGUSTINA ELOK ROOSYTA	127.439.175	770	RAHAYU	93.673.060
471	SUMEDI	237.355.759	571	WAHYUNI	180.746.438	671	SANTI HERMAYANTI KUSUMA	127.420.213	771	DARIYANTO	94.608.267
472	JEFFRI REZZA ELNATHAN	237.019.446	572	PURWATI	179.754.812	672	MOHAMAD MUSLIMIN	127.338.869	772	TRIYANDI	93.338.343
473	SUMARTI	236.951.913	573	SARINAH	179.632.712	673	TAUFIK SETYAWAN	127.292.468	773	ENDANG WAHYUNINGSIH	103.960.012
474	WAHYUDI	236.884.558	574	FAJAR SIDIQ ANJARI	179.619.395	674	ERNI MARFUAH	127.277.408	774	YUNI PRIHANTI	92.990.243
475	CHANIYUDDIN	238.186.582	575	HANTORO	178.904.550	675	KARYATI	126.384.325	775	AKBAR PRIAMBODO	92.740.523
476	WAHYU DWI SUSANTI	235.780.493	576	HARTONO	178.033.530	676	EDMONDUS SATRIYO	126.677.612	776	ENDAH SETYAWATI	92.352.281
477	MULYANTO	235.712.316	577	ALI SODIKIN	177.686.392	677	ROKHMAYATI	126.023.393	777	SITI ASRIFAH	92.251.130
478	I KETUT WINATA	235.589.035	578	MUHAMMAD TOHA CHAMANDAN	177.640.965	678	SATO LAKSONO	125.932.397	778	SUPARTONO	92.133.707
479	SUGIYANTO	235.743.740	579	JAYADI	175.955.004	679	IRMA SUSILOWATI	125.869.873	779	ERHAM MAARIF	91.415.899
480	TULUS DWI HASTONO	235.597.197	580	RHOMY HASANAH	175.693.435	680	WENTI FEBRIANTI	125.038.847	780	HERI TRIYONO	261.214.933
481	SLAMET SUDADI	234.903.298	581	DEWI SRI UTAMI	175.121.217	681	KHURUTUL KHAINI	124.445.277	781	YATNO	90.497.834
482	ANTON OGI PRASETYAWAN	234.678.620	582	YANTO	180.070.352	682	ASHADI	124.366.175	782	HARIYATI	90.611.362
483	BANGUN DWI SAPUTRA	234.538.079	583	WIDI ASTUTI	174.570.048	683	MARIYATI	123.372.906	783	ISMANTO	89.463.295
484	PAULUS SRI AIRLANGGA	234.103.620	584	ANI ROCHMATIN	174.851.370	684	MUSYAWAROH	122.556.923	784	SRI WIDATI	88.232.129
485	SUKIJAN	234.040.317	585	RONI ANDRIYANTO	172.179.337	685	ISMAWAN	121.864.102	785	DARLIM	88.705.777
486	ROCHIMIN	233.558.480	586	SUPARJO RUSTAM	171.493.138	686	YATMINAH	120.770.138			

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)



TAHUN 2024 - KONVENSIONAL

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.	NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
801	HARTANTO	84.497.663	865	MARYONO	71.076.845	929	YUDHA WIDYANTO	57.826.063	993	BRAMANTYO AJI NUGROHO	46.076.385
802	TRI WARNI	84.389.115	866	HEMAWATI HIDAYAT	70.776.104	930	INDRI ASTUTIK	99.699.414	994	YASIN ARAFAH	45.623.093
803	SUTARTI	84.233.616	867	SUNARNO	70.731.311	931	NOVITA EKA MARDLIYATUL	57.170.218	995	ROHMAT	45.503.080
804	SUKINO	83.932.376	868	CHELLY WARDANINGRUM	70.212.730	932	BUDI SEPTONO	58.113.290	996	TIYONO	45.820.312
805	USWATUN KHASANAH	83.394.433	869	RAHMAT SUDIRMAN	70.394.275	933	HERU NUGROHO	56.872.928	997	SUWARTO	45.283.092
806	MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN	86.215.100	870	ALWI SOPYAN	69.878.245	934	SITI WIDAYATI	56.750.814	998	ALIFAH NURSIWI	46.555.781
807	SUMARYONO	82.788.291	871	TRI JOKO PARJITO	69.792.943	935	DIYAH SETYOWATI	56.219.839	999	MUGHARTI	45.101.864
808	TUWUH	82.767.797	872	TULAL SAPUTRO	69.668.336	936	MOHAMMAD ARIQ MAULANA IQBAL	56.249.931	1000	SUVATIN	44.993.943
809	DIYAH NUR SANTI	82.749.674	873	JAMBANG WIDYANTORO	68.970.217	937	HARJANTO NUGROHO BASUKI	55.749.874	1001	WARKUM	44.704.531
810	STEFANUS TINO ADIKA	82.328.782	874	AGUS NURYATNO	68.909.305	938	MUHAMMAD FAIZIN	55.695.574	1002	BAMBANG KURNIAWAN	44.755.435
811	MANFAAT	82.277.855	875	RULI LISTIANA PUTRI	68.389.324	939	SURATMI	55.423.717	1003	M MUHLISIN	44.611.472
812	BADRIYAH	82.246.367	876	TUTI SRI ISTIARTI	34.3.468.665	940	RUBIAH	54.790.417	1004	BUSTANUL ARIFIN	44.521.068
813	M KHAIRUL UMAM ZAM ZAMI	81.497.337	877	NADA PUTRI ANGGRAINI	68.029.754	941	KHUNIFAH	54.700.677	1005	JAMILAH	44.510.364
814	YUNI	81.864.856	878	RIZA MAFAZA	68.006.941	942	MARULLY MAHRETHO	57.565.720	1006	SUMADI	44.398.080
815	SEPTIANA	246.552.024	879	SUJARWO	67.678.500	943	VIVID AGUSTININGSIH	54.766.414	1007	NURKOYIN	45.390.459
816	YULIA ENNY TRI MARIYATI	81.265.419	880	IMAM SYAFII	67.500.000	944	JULITO GUTERRES FERNANDES	53.879.810	1008	HERI EKA PHARAYANA	44.141.832
817	KSP ANNISA WONOSOBO	80.548.311	881	FETNAWATI	67.167.308	945	SARWANTO	53.409.023	1009	SRI WAHYUNI	44.152.315
818	KARSLAH	80.572.934	882	SUGIMAN	67.141.123	946	ARIF PRIBADI	53.060.324	1010	JARIYAH	44.137.240
819	BINA NURAEINI	80.396.298	883	WAKIDI	67.037.375	947	UMI ROHMATIN	52.645.105	1011	MUHAMMAD YASIN	44.055.496
820	PUPUT ADINDA	81.353.829	884	SYAROH	66.833.699	948	INDAYANI	52.537.633	1012	LARASATI CINTA NEGARI	44.043.656
821	SITI NGAISAH	79.789.924	885	NOPI FITRIYANTI	66.845.224	949	JAMAL	52.390.499	1013	ENDAH YUNITA SARI	44.035.926
822	MUCHAMMAD SABARI	80.506.165	886	FERMAN	66.690.550	950	RAGHA GALANG PAMUNGKAS	53.277.521	1014	WALIYANI	47.189.358
823	PRİYANTORO	79.240.908	887	USWATUN HASANAH	66.625.058	951	NOOR ROCHIDAH	57.154.565	1015	SUNARKO	45.829.139
824	SUPRIYATUN	78.721.506	888	ZUMAS RYAN FUADI	66.246.954	952	EKO SULISTIYO	52.079.201	1016	MISTI	43.414.099
825	YAYUK LISTIYANI	78.541.845	889	WAGIMAN HADI MUHTARUM	65.608.831	953	EKA NUR SITI ALIFAH	57.503.841	1017	AGUS ANGGORO HARI PURWANTO	43.282.074
826	SUYOTO	77.655.854	890	TARMI	65.603.105	954	PUSPITASARI	51.511.522	1018	WAHYU	43.128.296
827	RUSIAH	77.699.904	891	SRI ASTUTI	65.507.537	955	TUTIK HANDAYANI	51.450.247	1019	PANTI ROKHANI	43.130.072
828	PURNAMI	77.597.808	892	SISKA ASMARA	65.502.979	956	EDI RYANTO	51.148.659	1020	DESY DWI ASTUTI	42.993.543
829	RINA ASTUTI	77.568.019	893	KHOMSATUN	65.264.659	957	SRIWATI SEPTIANI	52.101.157	1021	SASON HUDIONO	43.157.536
830	AGUSTIN NURHIDAYAH	77.068.336	894	SUJARJO	65.224.947	958	SARTONO	50.852.829	1022	RAHARJO	42.690.100
831	NANTO NUGROHO	76.715.966	895	ZHAHROTUL MUKHOYYAROH	65.191.043	959	TAUFIK SETYAWAN	50.515.926	1023	SITI MASHUDAH	42.672.510
832	DONI APIRIADI	76.257.122	896	NENI WIDIARNI	64.832.027	960	INDAH SRI MARYATI	50.480.219	1024	BINGUN	42.586.730
833	TRIYANTO	76.207.307	897	SRI WIDAYATI	64.423.192	961	SULAIMAN ZUHDI	50.136.699	1025	SUJARWO	42.351.749
834	SAMINEM	77.325.944	898	WINARSIH	64.224.311	962	IKE KURNIAWATI	50.045.415	1026	MAS HURI KOHAR	136.192.055
835	ACHMAT SOLEH	76.204.744	899	ALI MANSUR	64.070.133	963	CHAMIA ABIDAH	50.007.490	1027	KRISTINA JUMIATI	42.219.458
836	SRIYATI HANDAYANI	75.564.368	900	SARI KARLINA	64.051.591	964	EDY KISWANTO	49.730.672	1028	NUR HASANAH	42.196.024
837	KUYAEMAH	74.885.813	901	WISNU WIDYANANTO	63.824.032	965	AGUNG DRAJAT PAMUNGKAS	50.718.606	1029	FAJAR HERDY SULISTYO	42.057.313
838	TURIJAN	74.682.064	902	ZUMROTUN	64.568.779	966	EKO YULIONO	50.102.385	1030	RIKA RESTIFAUZI	42.043.823
839	ISKANDAR HIDAYAT	74.517.010	903	SITI NUR BAROKATI	63.351.611	967	MARIMO	49.439.869	1031	EKO ANANTO	122.181.915
840	BUDI YANTO	73.994.722	904	GURUH SUGIARTO PUTRO	63.030.531	968	RUHMIYATI	51.304.100	1032	SUHARSOJO	130.745.605
841	DANIK YUNIARTI	244.340.439	905	GHOFAH AKHADI	63.011.695	969	KPRI MINA SEJAHTERA	49.022.610	1033	MUHAEMIN	43.827.986
842	TEGUH SUMANTORO	73.677.347	906	SITI REJEKI	62.905.195	970	HARYANTI	49.346.340	1034	SEKAR NURANI	120.613.492
843	ENDAH PURWATI MULYANINGRUM	73.467.844	907	ROBIATI	65.646.840	971	ENI KUSRINI	50.672.129	1035	SRI HANDAYANI	83.583.182
844	BEJO HADI PRAYITNO	76.856.153	908	LOURENCIA VANNY AGUSTHA	62.628.388	972	RIZKI HANAFIA	48.839.708	1036	MIFTAH SARIFUDIN	81.757.095
845	PAIYEM	73.505.631	909	PARNO	62.231.633	973	ZAENAL ABIDIN	48.830.847	1037	WENNY DIAH APRILIYANTI	67.597.810
846	THORIO MAFADHON	73.349.258	910	MUH ROZI	61.756.722	974	BAMBANG SUTRISNO	48.641.060	1038	DYNA MILATUL AZKA	70.913.363
847	SOLIKHIN	72.910.244	911	EKA MARIANA	61.731.793	975	PUJIYANTO	48.957.907	1039	KHOERU DZIKRY	61.091.403
848	SUH CATUR SANTOSO	72.677.220	912	NGAZIS	61.726.163	976	PUJI ASTUTIK	48.403.814	1040	MUNIR FAJAR KHOTIMAH	49.329.587
849	SUKISNO	72.638.183	913	HENRI WAHYONO	61.487.029	977	SUPARTINI	48.323.180	1041	KAISNA ADI NAWASA	42.119.640
850	DONI KRISTIANA	72.569.617	914	KRISDIANA	64.223.689	978	ZULAIKHAH	48.057.644	1042	ROHMAD NURLAILI	655.768.728
851	SRI SUPARTINI	72.424.139	915	ANDREAS JULIYAN OMEGA	60.115.010	979	DIRNO	47.527.057	1043	NURYATI	394.889.660
852	ENDANG SRI HASTUTI	72.159.627	916	DARYANTO	60.328.560	980	JOKO WAHYUDI	47.484.077	1044	HARDIYANTO	288.243.074
853	ASLIYAH	72.100.024	917	DARMINTO	59.984.388	981	MUDIYONO	47.379.892	1045	HADI PURNOMO	272.555.719
854	NUR FAIZAH	72.112.833	918	SITI SUSANTI	59.852.576	982	FAJAR YANUAR	47.255.428	1046	SUCI INDRATI	258.041.474
855	DENI ISKANDAR	71.936.373	919	TRI HARYANTI	59.777.807	983	WARJAN	47.258.364	1047	EVY NURHIDAYAH	247.290.368
856	MUSTOLAH AINUL KHASAN	71.811.326	920	ABDUL AZIZ IBRAHIM IMAM MUSA	59.608.717	984	PURNIYAWATI	47.119.292	1048	ANISAH	88.319.360
857	YUNINGSIH	71.833.617	921	MAULANA ZAKKY ABADI	60.816.600	985	ANGGIT HARYO CAROKO	46.892.253	1049	HERLINA	69.367.198
858	SRI NARTI	71.723.436	922	STEFANUS BUDHI SETYAWAN	58.809.078	986	YANI MARYANI	46.712.012	1050	DWI PRASETYO	59.940.595
859	IMAM KURNIA CAHYANTO	71.607.517	923	ANDI RUSTAM TOPO PRAYITNO	58.524.893	987	TRI HARTANTI	46.618.519	1051	SUHARNO	57.732.817
860	MUSBIKHIN	71.516.303	924	EKO YULIANTO	58.425.233	988	SUPADI	49.509.210	1052	SURYADI	49.349.952
861	AIS SETIAWATI	71.432.442	925	ISTIOMAH	58.337.787	989	INO DANDRY ALAMSYAH	47.079.542	1053	BAGUS AGIL IRAWAN	47.407.573
862	SUWARTO	71.390.408	926	FEBRIANA INDAH MULYANTINI	58.054.484	990	PRASETYO HADI PATIKNO	46.322.025			
863	DJASWADI	71.381.733	927	NORMASARI	57.926.772	991	SRI YATNI	47.738.204			
864	BERLIANTI PUSPITORINI	71.328.350	928	AYU NOVITA SARI	57.907.404	992	SARIPAH	46.216.952			
TOTAL : 332.952.138.388											

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)



TAHUN 2024 - UNIT USAHA SYARIAH

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
1	ADITYA LAKSONO KURNIAWAN	66.331.887
2	PARMANTO	14.039.582
3	AMBAR ISWADI	6.869.038
4	YPA AL MUHYI SRAGEN	535.068.317
5	TRI WAHYUNI	62.582.290
6	KATIMIN	115.344.394
7	SUKARLIN	10.966.382
8	TEDDY SURYAWAN	10.966.381
9	TRI HARYANTO	43.763.852
10	AKO SARWANTO	41.358.855
11	AHMAD FAQIH	110.161.521
12	MARIA SEVINA WINDIARTI	3.724.990
13	BAGUS HADI PURWOKO	40.317.389
14	DWI WINDAYATI	28.577.046
15	SHIVA MAULANA KHOIRU INSAN	54.885.839
16	DWI JOKO SUPRIYANTO	38.619.403
17	SAIFUDIN	55.665.164
18	SITI AISAH	36.523.497
19	SILVIA KHOIRUN NISA	21.979.552
20	TOPAN WIJAYA PUTRA	34.126.043
21	SAIFUDIN	78.929.858
22	GATOT SATRIA PAMUNGKAS	17.452.530
23	ISKANDAR ZULKARNAEN	17.452.730
24	ANI AMBARWATI	10.356.831
25	DENI IRAWATI BASUKI	36.619.958
26	HERMAN SUSANTO	14.284.037
27	SARIFAH NUROHMAH	26.413.744
28	ARMAN ADNANTO	26.074.099
29	MASJADIN SUSILO	47.940.469
30	KARYAWATI RAHAYU	619.896.531
31	DENNY ARIYADHY	6.609.769
32	YORDAN IRSYADIE AZIEZ	67.742.886
33	NARPUN	54.194.315
34	SUPANDRI	30.902.662
35	RAMA PRAHARYO	57.961.354
36	HERMAWAN PS	119.452.553
37	NASIAH	2.607.526
38	TASMIAH	18.385.868
39	UMBARNO	572.429.824
40	ARIS WIGIANTO	19.391.463
41	HERI SLAMET HARYADI	15.353.818
42	SOHIMAH	25.608.435
43	YULIANTO	33.094.487
44	WIWIN INA PRASETYA	36.387.709
45	SUWARSO	79.271.792
46	HADI SUWITO	24.904.546
47	RATNA	47.115.049
48	AMAT DASURO	670.841
49	AHMAD ARIFIN	5.771.426
50	RUSLANI	320.817.898
51	NUR SOFIAH	26.566.890
52	ABDULLAH MOKHTAR ALY	70.288.385
53	GHO FAR ISMAIL	78.484.603
54	LPIS MUTIARA HATI LASEM	1.912.582.468
55	MUFTI MUTTAQI	84.725.215
56	LPIS MUTIARA HATI LASEM	564.900.000

Total : 6.503.513.991

74th

GRIYA PERBANAS



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL



www.perbanas.org



Perhimpunan Bank Nasional



perbanas_official